



LAKIP DITANPAN 2022

KATA PENGANTAR KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Puji Syukur Kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 tersusun sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah wujud pertanggungjawab pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Polewali Mandar, serta sebagai bahan evaluasi kinerja dalam pelaksanaan Visi dan Misi OPD guna tercapainya tujuan dan sasaran sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, untuk itu diharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat bermanfaat untuk kita semua.

Polewali 10 Februari 2023

Pt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Polewali Mandar



H. ANDI IBRAHIM, SP, MP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 197207072000031009

DAFTAR ISI

Kata Pangantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
Ringkasan Eksekutif		iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar	4
	C. Isu Strategis dan Permasalahan Dinas Pertanian dan Pangan	9
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	14
	A. Rencana Strategis	14
	B. Perjanjian Kinerja	20
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA dan KEUANGAN	23
	A. Akuntabilitas Kinerja	21
	B. Akuntabilitas Keuangan	90
BAB IV	PENUTUP	94
	A. Kesimpulan	94
	B. Saran	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
	1. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022	
	2. Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022	
	3. Realisasi Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komposisi Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanian dan Pangan Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2022	7
Tabel 2	Komposisi Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanian dan Pangan Menurut Golongan/Setingkat Golongan, Tahun 2022	7
Tabel 3	Komposisi Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanian dan Pangan Menurut Eselon/Setingkat Eselon, Tahun 2022	8
Tabel 4	Komposisi Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanian dan Pangan Menurut Jabatan Fungsional	8
Tabel 5	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024	18
Tabel 6	Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022	20
Tabel 7	Pagu Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022	21
Tabel 8	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2022	25
Tabel 9	Bobot indikator Kabupaten dalam Penyusunan IKP	26
Tabel 10	Nilai Indeks Aspek Ketahanan Pangan Tahun 2021 dan 2022	28
Tabel 11	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Menunjang Ketahanan Pangan	35
Tabel 12	Target dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis 2 Tahun 2022	40
Tabel 13	Target dan Realisasi Vaksinasi dan Pengobatan Antraks 2016-2022	61
Tabel 14	Target dan Realisasi Vaksinasi Rabies Tahun 2019-2022	62
Tabel 15	Pelaksanaan Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku tahun 2022	64
Tabel 16	Program, Kegiatan, dan Sub. Kegiatan Menunjang Pencapaian Sasaran 2	71
Tabel 17	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tiga Tahun 2022	76

Tabel 18	Hasil Evaluasi LAKIP Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2021	77
Tabel 19	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Menunjang Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah	80
Tabel 20	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Menunjang Administrasi Keuangan	82
Tabel 21	Jenis Layanan Dinas Pertanian dan Pangan	85
Tabel 22	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Menunjang Manajemen Perkantoran	89
Tabel 23	Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2022	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar	6
Gambar 2	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2019-2024	15
Gambar 3	Perbandingan Capaian Nilai Indeks Ketahanan Pangan dalam Kurung Waktu Empat Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Renstra	27
Gambar 4	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan di Kabupaten Polewali Mandar	30
Gambar 5	Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan	33
Gambar 6	Persentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dalam Kurung Waktu Empat Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Renstra	42
Gambar 7	Capaian Persentase Pertumbuhan Produksi Hortikultura dalam Kurung Waktu Empat Tahun Terakhir dibandingkan Dengan Target Capaian Akhir Renstra	43
Gambar 8	Persentase Pertumbuhan Produksi Perkebunan dalam Kurung Waktu Empat Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra	47
Gambar 9	Persentase Pertumbuhan Produksi Unggas dan Telur	52

dalam Kurung Waktu Empat Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra

Gambar 10	Perbandingan Populasi dan Produksi Daging Sapi Tahun 2019-2022 (Ton)	53
Gambar 11	Perbandingan Populasi dan Produksi Daging Kambing Tahun 2019-2022 (Ton)	55
Gambar 12	Perbandingan Populasi dan Produksi Daging Unggas dan Telur Tahun 2019-2022 (Ton)	56
Gambar 13	Grafik Realisasi Vaksinasi dan Pengobatan Antraks Tahun 2016-2022	62
Gambar 14	Grafik Realisasi Vaksinasi Rabies Tahun 2019-2022	63
Gambar 15	Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku Tahun 2022	65
Gambar 16	Grafik Jumlah Ternak Masuk dan Keluar Wilayah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022	66
Gambar 17	Grafik Ragam Ternak yang Masuk Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022	67
Gambar 18	Ragam Ternak yang Keluar Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022	68
Gambar 19	Perbandingan Capaian LAKIP dalam Kurung Waktu Tiga Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra	111
Gambar 20	Perbandingan Capaian IKM dalam Kurung Waktu Tiga Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra	117
Gambar 21	Alokasi Anggaran dan Realisasi Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022	124



RINGKASAN EKSEKUTIF

LAKIP merupakan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana Kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi OPD. LAKIP juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, sebagai bahan evaluasi dan penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja organisasi, sehingga kedepannya dapat dilakukan perbaikan kebijakan, strategi dan aksi untuk hasil yang lebih optimal.

Perencanaan Kinerja Tahun 2022 Dinas Pertanian dan Pangan memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dan 15 indikator dengan target dan capaian sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	%
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks ketahanan pangan	73.72	74.17	101
2	Meningkatnya kapasitas produksi sektor pertanian	Persentase pertumbuhan produksi padi	0.50%	8%	1,600
		Persentase pertumbuhan produksi jagung	0.50%	203%	40,600
		Persentase pertumbuhan produksi kedelai	0.50%	-87%	(17,400)

		Persentase pertumbuhan produksi buah-buahan	45%	-15%	(33)
		Persentase pertumbuhan produksi sayuran	0.50%	62%	12,400
		Persentase pertumbuhan produksi Kakao	8.5%	0.98%	12
		Persentase pertumbuhan produksi Kelapa	0.50%	0.82%	164
		Persentase pertumbuhan Produksi Kopi	0.50%	0.03%	6
		Persentase pertumbuhan Populasi Sapi	1.5%	0.56%	37
		Persentase pertumbuhan Populasi Kambing	0.50%	0.01%	2
		Persentase pertumbuhan Populasi Unggas	0.50%	0.50%	100
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	BB	100
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	95.56%	100.00%	105
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Sangat Baik	100
	KINERJA RATA-RATA		196	273	139

Untuk pencapaian sasaran tersebut telah dialokasikan anggaran tahun 2022 sebesar Rp 42,775,872,843,- dan terealisasi Rp 42,396,459,588,- atau persentase realisasi 99%, dengan rata-rata pencapaian kinerja 139 %. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Tabel T-E-1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dinas Pertanian dan Pangan berada pada kategori realisasi kinerja **Sangat Tinggi** yaitu berada pada interval nilai realisasi kinerja $91\% \leq 100\%$. Sedangkan dari segi efisiensi penggunaan anggaran Dinas Pertanian dan Pangan mampu melakukan efisiensi sebesar 40%. Efisiensi tersebut terdapat pada pelaksanaan pengadaan bank pakan, pengadaan sarana UPH Perkebunan serta pelaksanaan operasi pasar murah.



Demplot EF II
-3°23'10", 119°11'44" / 66,0m
08/06/2022 16:10:43

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pertanian dan Pangan selaku unsur pelaksana urusan Pertanian dan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pertanian dan

Pangan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kabupaten, provinsi dan nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2022 dan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar sebagai entitas SAKIP wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam Penyusunan Laporan ini, diungkapkan capaian kinerja organisasi yang membandingkan

antara target dengan realisasi, realisasi kinerja tahun berkenaan dengan tahun-tahun sebelumnya.

2. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP

Dasar Hukum penyusunan LAKIP Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas pelaporan kinerja instansi pemerintah;
- e. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- f. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

3. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP

Maksud penyusunan LAKIP Dinas Pertanian dan Pangan yakni menyediakan dan memberikan informasi terkait pencapaian kinerja

secara terukur dengan memberikan perbandingan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, perbandingan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, keberhasilan dan kegagalan, serta efisiensi sumber daya dan akuntabilitas keuangan.

Tujuan penyusunan LAKIP yakni sebagai wujud pertanggungjawaban dan alat ukur untuk mengetahui kemampuan OPD dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi serta sebagai bahan dalam melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam pencapaian kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12) dan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- **Kedudukan**

Dinas Pertanian dan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan Pertanian dan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

- **Tugas Pokok**

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar mempunyai Tugas Pokok untuk membantu Bupati dalam

melaksanakan urusan Pertanian dan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah.

- **Fungsi**

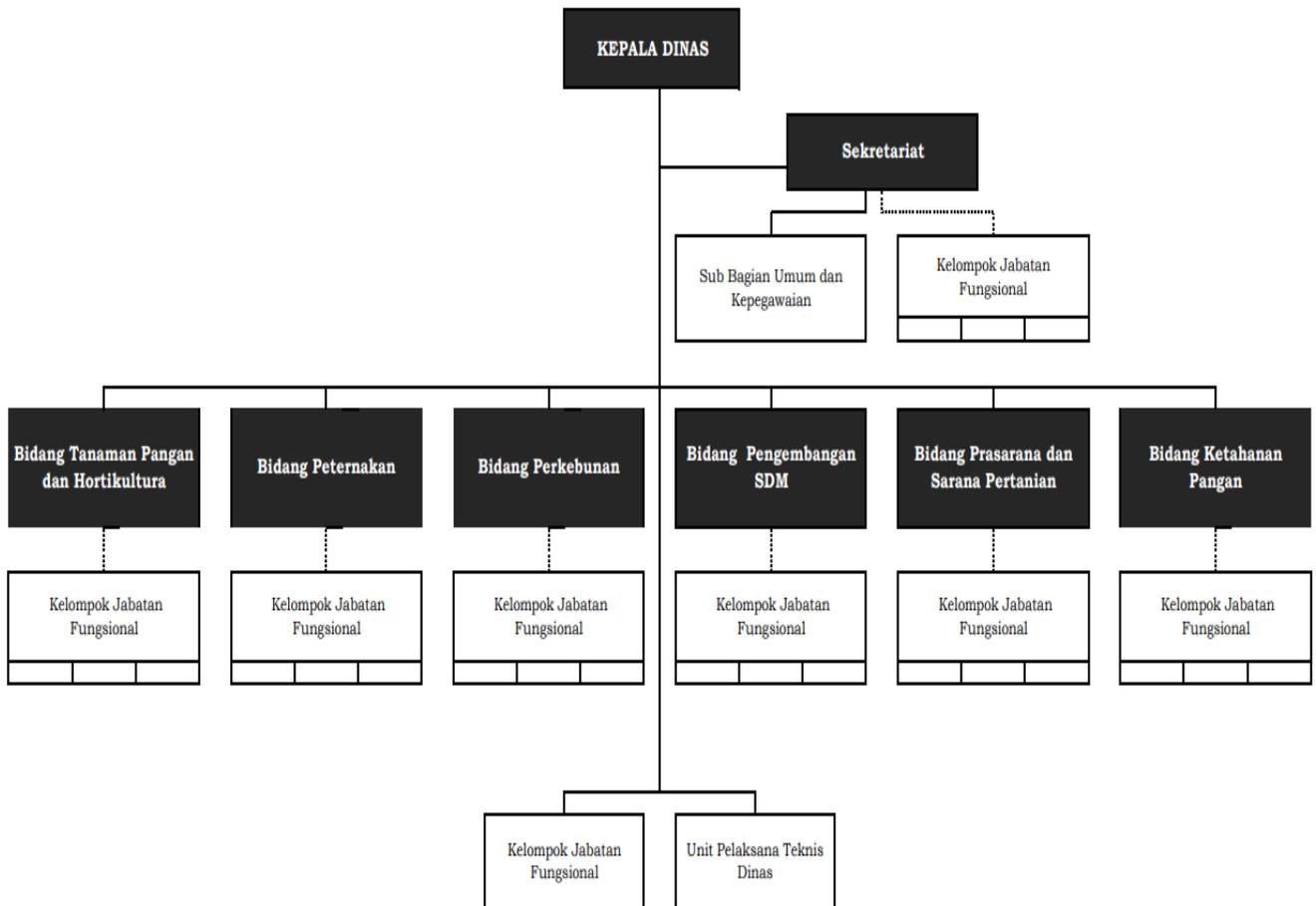
Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut diatas, Dinas Pertanian dan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan Pertanian dan Pangan;
- Pelaksanaan kebijakan Pertanian dan Pangan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pertanian dan Pangan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Mengenai Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat pada gambar 1 berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar



Banyaknya Aparatur Sipil Pegawai Negeri Sipil dirinci menurut Pendidikan, Golongan dan Eselon keadaan Desember Tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 1.
Komposisi Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanian dan Pangan Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2022

Jenis Pendidikan	PNS		Jumlah PNS	P3K		Jumlah P3K	Total ASN
	Jenis Kelamin			Jenis Kelamin			
	Laki - Laki	Wanita		Laki-Laki	Wanita		
Lainnya (S2/S3)	22	22	44	-	-	0	44
Sarjana (S1)	83	49	132	9	9	18	150
Diploma II / III	4	3	7	1	1	2	9
SLTA/Sederajat	27	9	36	12	3	15	51
Jumlah	136	83	219	22	13	35	254

Tabel 2.
Komposisi Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanian dan Pangan Menurut Golongan/Setingkat Golongan, Tahun 2022

Golongan/ Setingkat Golongan	PNS		Jumlah PNS	P3K		Jumlah P3K	Total ASN
	Jenis Kelamin			Jenis Kelamin			
	Laki-Laki	Wanita		Laki-Laki	Wanita		
II	29	11	40	0	0	0	40
III	75	57	132	0	0	0	132
IV	30	17	47	0	0	0	47
9	0	0	0	9	9	18	18
7	0	0	0	1	1	2	2
5	0	0	0	12	3	15	15
Jumlah	134	85	219	22	13	35	254

Tabel 3.
Komposisi Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanian dan Pangan
Menurut Eselon/Setingkat Eselon, Tahun 2022

Eselon/Setingkat Eselon	PNS		Jumlah PNS	P3K		Jumlah P3K	Total ASN
	Jenis Kelamin			Jenis Kelamin			
	Laki-Laki	Wanita		Laki-Laki	Wanita		
II	1	0	1	0	0	0	1
III	5	1	6	0	0	0	6
IV	16	16	32	0	0	0	32
Jumlah	22	17	39	0	0	0	39

Tabel 4.
Komposisi Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanian dan Pangan
Menurut Jabatan Fungsional, Tahun 2022

Fungsional	PNS		Jumlah PNS	P3K		Jumlah P3K	Total ASN
	Jenis Kelamin			Jenis Kelamin			
	Laki-Laki	Wanita		Laki-Laki	Wanita		
Penyuluh Pertanian	72	35	107	22	13	35	142
Penelaah Data	2	0	2	0	0	0	2
Pengelola	24	12	36	0	0	0	36
Verifikator	0	1	1	0	0	0	1
Analisis	5	8	13	0	0	0	13
Pengawas	5	4	9	0	0	0	9
Bendahara	0	1	1	0	0	0	1
Medik Veteriner	0	3	3	0	0	0	3

Pengadministrasian	3	2	5	0	0	0	5
Penyusun	0	1	1	0	0	0	1
Pemeriksa	1	0	1	0	0	0	1
Pranata	1	0	1	0	0	0	1
Perencana	0	1	1	0	0	0	1
Jumlah	113	68	181	22	13	35	216

C. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Dinas Pertanian dan Pangan yang juga merupakan isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024 adalah belum tertatanya pola tanam dengan baik sehingga Indeks Pertanaman (IP) belum maksimal; Belum maksimalnya infrastruktur Pertanian dan Pangan; Tingkat SDM aparatur tentang peningkatan pemasaran yang masih rendah; Tingkat kehilangan hasil (losses) yang masih cukup tinggi dan masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian terhadap

produk impor; Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar dan permodalan serta perlindungan usahatani; Belum optimalnya kelembagaan petani; Tingginya jumlah hama dan penyakit tanaman perkebunan; Kualitas dan kuantitas SDM aparatur sipil negara (ASN) yang masih rendah; Kualitas dan kuantitas SDM petani yang masih rendah; Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan pangan lokal dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah dan nasional; Kurang diminatinya lumbung pangan oleh masyarakat; Kurang tepatnya penatalaksanaan peruntukan lahan pertanian dan terbatasnya pendanaan APBD Kabupaten dalam pengelolaan sektor pertanian di Kabupaten Polewali Mandar.

Dalam menangani permasalahan tersebut ditemukan beberapa faktor penghambat sebagai berikut :

1. Kebijakan perbenihan yang ada (Pusat dan Daerah) belum sinergi, rendahnya SDM Petani dan Petugas yang menangani perbenihan;
2. Belum terkoordinasinya dengan baik antara petani, petugas pengairan/irigasi, instansi penanggungjawab perbenihan dan instansi yang menangani penyuluhan terkait penerapan pola tanam pada tiap-tiap wilayah;
3. Masih rendahnya rasio anggaran terhadap terhadap infrastruktur yang belum terbangun/ direhab;
4. Belum terkoordinasinya dengan baik antara petani, petugas pengairan/irigasi, instansi penanggungjawab perbenihan dan instansi yang menangani penyuluhan terkait penerapan pola tanam pada tiap-tiap wilayah;

5. Kontinuitas produksi pertanian yang tidak terjamin dan banyak petani yang terikat kontrak dengan tengkulak sehingga sulit untuk melakukan pemasaran ke tempat lain;
6. Peningkatan produksi pertanian sangat ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur yang baik;
7. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah kurang berpihak terhadap pembiayaan bagi kelompok tani/ternak penerima bantuan, sehingga minat petugas untuk melakukan pembinaan juga rendah;
8. Ketersediaan lahan peternakan terbatas;
9. Infrastruktur pemasaran hasil peternakan masih kurang;
10. Rasio SDM petugas terhadap jumlah ternak masih rendah;
11. Tingginya biaya produksi akibat sarana produksi yang belum sepenuhnya bersubsidi menghambat petani untuk menerapkan teknologi yang memerlukan tambahan biaya yang cukup tinggi;
12. Tindakan pencegahan, pengendalian dan pengobatan harus sering dilakukan untuk memperbaiki produksi dan produktifitas perkebunan;
13. Rendahnya jumlah pelatihan peningkatan kualitas SDM ASN;
14. Rendahnya jumlah pelatihan dan bimbingan teknis serta lahan percontohan belajar untuk petani;
15. Kurangnya kegiatan sosialisasi tentang pemanfaatan pangan lokal;
16. Kurangnya sosialisasi dan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lumbung pangan masyarakat;
17. Rendahnya pemanfaatan lahan pertanian masyarakat.

Selain itu ada juga faktor pendorong yang menjadi penunjang keberhasilan dalam penanganan masalah sebagai berikut :

1. Infrastruktur pertanian di Kabupaten Polewali Mandar sangat memungkinkan untuk pengembangan penangkaran benih;
2. Peningkatan sistim distribusi sarana pertanian (pupuk)
3. Infrastruktur pertanian di Kabupaten Polewali Mandar sangat memungkinkan untuk pengembangan penangkaran benih
4. Dalam rangka mewujudkan optimalisasi produksi dan produktifitas pertanian, Kementerian Pertanian memprogramkan : (1) Revitalisasi Infrastruktur pertanian, (2) Optimasi Lahan yang kurang produktif, (3) Perluasan areal pertanian.
5. Kebutuhan masyarakat akan hasil pertanian cukup tinggi sehingga permintaan akan hasil pertanian juga cukup tinggi
6. Dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan infrastruktur pertanian cukup tinggi malalui dana APBN (TP, Dekon, DAK)
7. Dalam rangka peningkatan produksi hasil peternakan Kementerian pertanian memprogramkan swasembada daging sapi;
8. Potensi Pakan yang tersedia khususnya limbah pertanian dan perkebunan serta tingginya minat masyarakat di Kab. Polewali Mandar untuk beternak merupakan faktor pendorong pengembangan peternakan
9. Animo masyarakat untuk beternak cukup tinggi
10. Tuntutan masyarakat akan pangan yang aman, sehat utuh dan halal (ASUH) cukup tinggi.
11. Dampak penyakit ternak terhadap manusia dapat menular (zoonosis) sehingga kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kesehatan ternak cukup tinggi
12. Degradasi lahan pertanian menuntut untuk penerapan teknologi pertanian yang tepat guna sehingga motivasi ini merupakan faktor

pendorong bagi petani untuk menerapkan teknologi pertanian tepat guna.

13. Peningkatan pengetahuan dan bimbingan teknis petani dalam menangani kasus penyakit pada lahan perkebunan masyarakat
14. Peningkatan jumlah pelatihan dan bimbingan teknis untuk ASN
15. Peningkatan jumlah pelatihan dan bimbingan teknis serta lahan percontohan tempat belajar untuk petani
16. Peningkatan jumlah kegiatan sosialisasi pemanfaatan pangan lokal
17. Peningkatan jumlah kegiatan pembangunan lumbung pangan masyarakat
18. Peningkatan penerapan pemanfaatan lahan pangan masyarakat secara berkelanjutan



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024. Renstra dimaksud berkedudukan sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari RPJMD di tingkat Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan serta pendanaan indikatif dan dilengkapi dengan tolok ukur pencapaiannya yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 serta memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta faktor penghambat dan pendorong, maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2019-2024, dirumuskan sebagai berikut :

Gambar 2
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan,
Tahun 2019-2024



Untuk mengetahui dan mengukur capaian Tujuan dan Sasaran Strategis dimaksud, maka perlu menentukan indikator kinerja Tujuan dan Sasaran. Penentuan indikator kinerja tersebut menggunakan kriteria **SMART-C** yaitu : *specific* (jelas), *measureable* (dapat diukur), *agreeable* (dapat disetujui), *realistic* (dapat dicapai), *time bounded* (memiliki batas waktu pencapaian) dan *continuously improved* (perbaikan berkelanjutan). Indikator kinerja tujuan dan sasaran merupakan indikator di level *outcome* (hasil). Indikator Sasaran Strategis dimaksud selanjutnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Di samping IKU dimaksud, disusun pula indikator sasaran strategis penunjang pencapaian IKU.

1. Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar

Visi Dinas Pertanian dan Pangan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (renstra) Dinas adalah **“Terwujudnya Pertanian Yang Mandiri, Inovatif, Efisien dan Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani”**.

Untuk mewujudkan misi yang ditetapkan maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar merumuskan misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Swasembada Pangan dan Usaha Agribisnis Hortikultura yang Ramah Lingkungan dan Berbasis Potensi Lokal;
- 2) Meningkatkan usaha agribisnis peternakan yang inovatif, berwawasan lingkungan dan sinergitas dengan usaha pertanian lainnya.
- 3) Meningkatkan mutu dan daya saing hasil produksi pertanian dan peternakan

2. Tujuan dan Sasaran

▪ Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemerataan Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan;
2. Meningkatnya Ketahanan Pangan;

▪ Sasaran

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran tentunya memperhatikan indikator kinerja sesuai Tupoksi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk periode 2019-2024, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar menetapkan Tujuan dan Sasaran Untuk mengukur sejauh mana Dinas Pertanian dan Pangan telah mencapai tujuan strategis, maka ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun kelima (2024). Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja utama Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE-					
			2019	2020	2022	2022	2023	2024
Meningkatnya Ketahanan Pangan		Skor Pola Pangan Harapan	81,21	83,41	85,61	87,8	90	92,2
		Pengeluaran Konsumsi rata-rata perkapita	683.935	788.935	808.659	828.875	849.597	870.597
		Jumlah desa/kelurahan rawan pangan	30 Desa/Kel	35 Desa/Kel	30 Desa/Kel	24 Desa/Kel	20 Desa/Kel	15 Desa/Kel
	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	81,21	83,41	85,61	87,8	90	92,2
Meningkatnya Pemerataan Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan		Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9,40	10,80	12,20	13,60	15,00	16,40
		Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Sarana Pertanian	30	40	50	60	70	80
	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
	Meningkatnya produksi peternakan	Persentase peningkatan produksi peternakan	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
	Meningkatnya produksi Tanaman Perkebunan	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
	Meningkatnya kompetensi Penyuluh Pertanian	Persentase Penyuluh Pertanian yang memiliki kompetensi Ahli	67,5	70,0	72,5	74,2	76,7	80,0

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	BB	BB	A	A	A
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

<http://dinastanpan.polmankab.go.id>

B. Perjanjian Kinerja 2022

Rincian Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 6
Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks ketahanan pangan	73.57	73.72
2	Meningkatnya kapasitas produksi sektor pertanian	Persentase pertumbuhan produksi padi	-16%	0.50%
		Persentase pertumbuhan produksi jagung	-71%	0.50%
		Persentase pertumbuhan produksi kedelai	-88%	0.50%
		Persentase pertumbuhan produksi buah-buahan	43%	45%
		Persentase pertumbuhan produksi sayuran	-31%	0.50%
		Persentase pertumbuhan produksi Kakao	7.9%	8.5%
		Persentase pertumbuhan produksi Kelapa	-0.7%	0.50%
		Persentase pertumbuhan Produksi Kopi	-3.6%	0.50%
		Persentase pertumbuhan Populasi Sapi	0.8%	1.5%

		Persentase pertumbuhan Populasi Kambing	0,2%	0.50%
		Persentase pertumbuhan Populasi Unggas	-27.6%	0.50%
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	BB
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	94.56%	95.56%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Baik	Sangat Baik

Untuk mencapai sasaran tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022 menyusun Program dan Kegiatan dengan alokasi Pagu Anggaran masing-masing program sebagai berikut :

Tabel 7
Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 21,284,635,220	PAD, DAU
2	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 509,309,900	DAU
3	Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 53,561,400	DAU
4	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 7,150,684,100	DAU

5	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	8,822,875,900	DAU, DAK
6	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	360,599,400	DAU
7	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	239,834,000	DAU
8	Perizinan Usaha Pertanian	Rp	155,500,140	DAU
9	Penyuluhan Pertanian	Rp	1,640,127,100	DAU
10	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp	2,000,000,000	DAU
JUMLAH		Rp	42,217,127,160	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Pangan merupakan pertanggungjawaban yang mencerminkan tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai visi dan misi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam RPJMD yang teknis pelaksanaan sasaran tersebut diturunkan pada Renstra SKPD serta setiap tahunnya ditetapkan dalam perjanjian kinerja pimpinan SKPD.

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah, yang dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Rencana Tingkat Capaian}}{\text{Rencana}} = \frac{\text{Persentase Pencapaian}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan analisis kinerja dan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, terwujudnya Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu satu tahun yang telah ditetapkan, serta menjadi bahan evaluasi kedepannya untuk melakukan perbaikan dalam pengambilan kebijakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis OPD, sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan 2019-2024.

Sasaran strategis dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan 2019-2024 yang telah di break down ke dalam renja dan pencapaian targetnya

telah di perjanjikan dalam Perjanjian Kinerja OPD tahun 2022 dengan masing-masing pencapaian target sasaran strategis sebagaimana akan di rinci sebagai berikut:



Meningkatnya Ketahanan Pangan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan tujuan kedua (tanpa kelaparan) dalam pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals - SDGs*).

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu Indeks Ketahanan Pangan.

IKP Nasional memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Secara khusus, penyusunan IKP Nasional dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi, serta memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota dan provinsi lain. IKP yang disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan intervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasaran.

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 berdasarkan publikasi hasil analisis Badan Ketahanan Pangan Nasional, sebagaimana disajikan pada realisasi pencapaian indikator sasaran strategis 1.

a. Realisasi capaian indikator kinerja terhadap Target

Capaian Sasaran Strategis 1, diukur menggunakan indikator **Indeks Ketahanan Pangan** dengan pencapaian indikator sebagai berikut :

Tabel 8
Target dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	PERSENTASE
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks ketahanan pangan	73.72	74.17	101%

Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan dengan bobot indikator sebagai berikut :

Tabel 9
Bobot Indikator Kabupaten dalam Penyusunan IKP

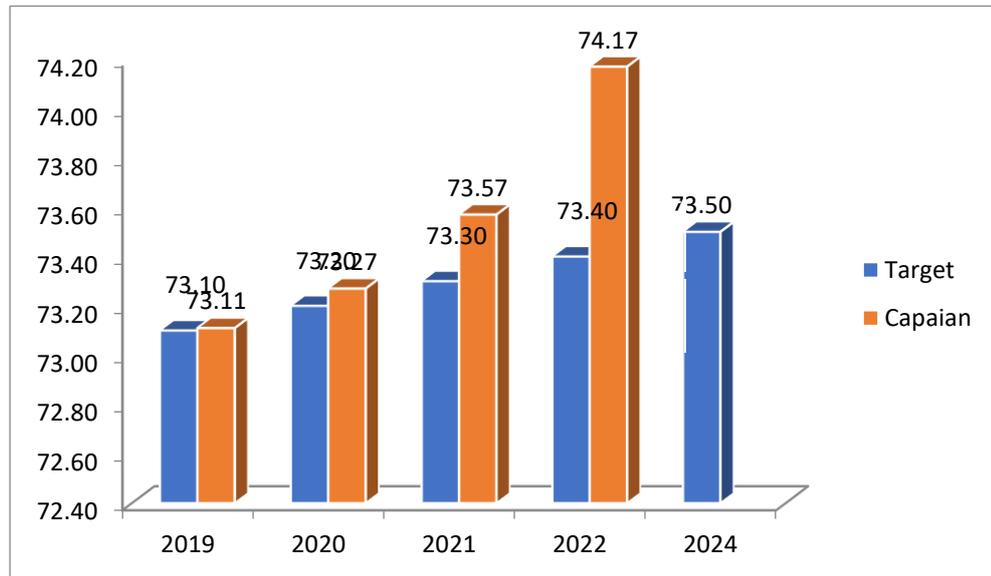
Bobot Indikator Kabupaten dan Provinsi Berdasarkan *Expert Judgement*

No	Indikator	Bobot
ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN		
1.	Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah	0,30
Sub Total		0,30
ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN		
2.	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	0,15
3.	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran	0,075
4.	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,075
Sub Total		0,30
ASPEK PEMANFAATAN PANGAN		
5.	Rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun	0,05
6.	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,15
7.	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,05
8.	Persentase balita <i>stunting</i>	0,05
9.	Angka harapan hidup pada saat lahir	0,10
Sub Total		0,40

Perbandingan realisasi terhadap tahun-tahun sebelumnya dan Akhir Renstra

Perbandingan Capaian Nilai Indeks Ketahanan Pangan dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun terakhir serta dibandingkan dengan target yang dapat dicapai sampai dengan akhir periode Renstra 2019-2024, dapat dilihat pada Gambar 3. berikut ini :

Gambar 3
Perbandingan Capaian Nilai Indeks Ketahanan Pangan Dalam Kurung Waktu Empat Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Renstra



Gambar 3. Nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Polewali Mandar mengalami kenaikan IKP dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2019, 2020 dan 2021 Nilai IKP Polewali Mandar sebesar 73,57, tahun 2022 sebesar 74,17 sehingga terdapat kenaikan capaian kinerja sebesar 101% dari tahun 2021 ke tahun 2022.

Nilai IKP yang diperoleh sebesar 74,17 menggambarkan bahwa **Kabupaten Polewali Mandar merupakan kabupaten yang tahan pangan** berdasarkan perolehan masing-masing Indeks tiga aspek ketahanan pangan sebagai berikut yang disajikan dalam Tabel 10.

Tabel 10
Nilai Indeks Aspek Ketahanan Pangan Tahun 2021 dan 2022

No	ASPEK	TAHUN	
		2021	2022
1	Ketersediaan	94.21	91.67
2	Keterjangkauan	73.24	75.12
3	Pemanfaatan	58.33	60.35
Nilai Komposit		73.57	74.17

IKP ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA), karena indikator yang digunakan dalam IKP merupakan indikator yang juga digunakan dalam penyusunan FSVA Nasional.

Kabupaten Polewali Mandar saat ini masih memiliki keterbatasan dalam mendukung kinerja subsistem distribusi pangan daerah. Dimana umumnya masih terdapat kekurangan pada fasilitas prasarana jalan dan sarana angkutan, sehingga mahalnya biaya distribusi dari sentra produksi ke sentra konsumsi. Hal ini terutama terdapat di kecamatan Alu, Tutar, Bulo dan Kecamatan Matangnga. Minimnya sarana dan prasarana ini menyebabkan daerah-daerah tertentu menjadi sangat terisolir dan sulit mengakses pangan. Oleh karena itu, dalam perencanaan kedepannya Kabupaten Polewali Mandar diperlukan perubahan dan alokasi anggaran yang cukup untuk sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran distribusi pangan ke seluruh wilayah.

Pertambahan penduduk yang cepat merupakan isu sentral yang dihadapi dunia, terlebih di negara berkembang termasuk Indonesia. Konsekuensi dari hal tersebut adalah peningkatan kebutuhan pangan untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka akan terjadi kompetisi pemanfaatan lahan yang dapat

mengancam keberadaan lahan pertanian menjadi lahan perumahan. Konversi lahan pertanian tersebut dapat mengancam pemantapan ketahanan pangan, namun disisi lain luas areal tanaman pangan juga semakin sempit.

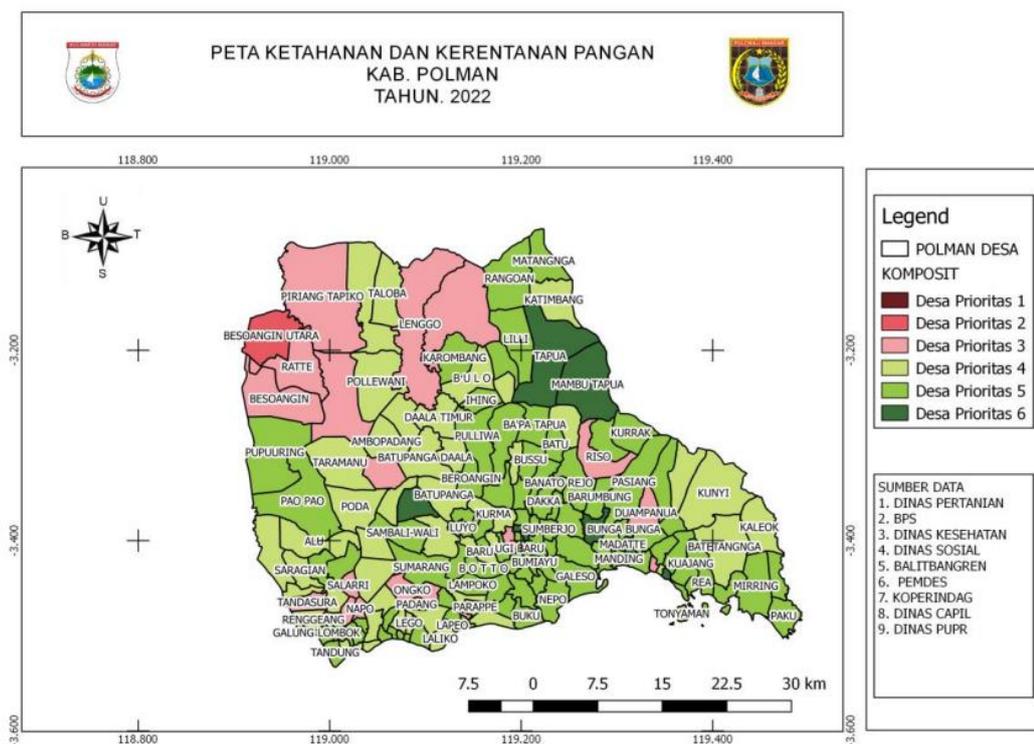
Berdasarkan data BPS Kab. Polman (2021), laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Polewali Mandar yaitu mencapai 1,22 % per tahun. Laju pertumbuhan penduduk Kab. Polman menurun dari tahun ke tahun. Namun hal ini tetap berdampak pada konversi lahan potensial pertanian ke lahan non pertanian seperti perumahan, daerah perkebunan, industri dan lainnya.

Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Pangan

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (desa) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (desa) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 167 desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar maka tidak ada desa (0) yang tergolong (Prioritas 1), 1 desa (Prioritas 2), 18 desa (Prioritas 3), 48 desa (Prioritas 4), 93 desa (Prioritas 5) dan 7 desa (Prioritas 6).

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 2 terdapat di wilayah Kecamatan Kecamatan Tubbi Taramanu (1 desa) yaitu Desa Besoanging Utara Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3 terdapat di wilayah Kecamatan Kecamatan Tubbi Taramanu (5 desa), Kecamatan Limboro (5 desa), Kecamatan Mapilli (1 desa), Kecamatan Bulo (2 desa), Kecamatan Campalagian (1 desa), Kecamatan Tapango (1 desa), Kecamatan Anreapi (1 desa), Kecamatan Polewali (1 desa), sesuai yang digambarkan pada peta berikut :

Gambar 4
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Di Kabupaten Polewali Mandar



Berdasarkan hasil Analisis Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerawanan pangan dan Kerentanan Pangan berdasarkan prioritas yaitu :

1. Desa Rentan terhadap Kerawanan Pangan Prioritas I secara umum disebabkan:

- Jumlah tenaga kesehatan yang ada di desa tersebut tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang akan dilayani.
- Ketersediaan air layak minum masih kurang.
- Jumlah penduduk kurang mampu masih tinggi (penduduk tidak sejahtera).
- Sarana dan prasarana transportasi yang kurang memadai.
- Jumlah sarana penyedia pangan (warung, toko, kedai) masih sangat kurang

2. Desa Rentan terhadap Kerawanan Pangan prioritas 2 secara umum disebabkan :

- Jumlah tenaga kesehatan yang ada di desa tersebut tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang akan dilayani.
- Sarana dan prasarana transportasi yang kurang memadai.
- Jumlah penduduk kurang mampu masih tinggi (penduduk tidak sejahtera).
- Jumlah sarana penyedia pangan (warung, toko, kedai) masih sangat kurang.

3. Desa Rentan terhadap Kerawanan Pangan Prioritas 3 secara umum disebabkan :

- Rasio luas lahan pertanian sangat rendah.
- Jumlah penduduk kurang mampu masih tinggi (penduduk tidak sejahtera).

- Jumlah tenaga kesehatan juga masih tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang akan dilayani

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (desa), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah desa diprioritaskan pada :

- a. Desa-desas prioritas 1-3 yang tersebar di Kecamatan Bulu, Limboro, Tubbi Taramanu, Alu, Luyo, Tinambung, Balanipa, Campalagian, Tapango dan Binuang.
- b. Desa-desas yang lokasinya jauh dari ibu kota kabupaten atau di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain
- c. Desa-desas di Kepulauan yang menghadapi kendala akses fisik terhadap sumber pangan.
- d. Desa-desas pemekaran yang fasilitas, infrastruktur dan kapasitas SDMnya masih terbatas.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di desa seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.

Gambar 5
Kerangka Intervensi Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan



Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan :

- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
- b. Pembukaan lahan pertanian baru dari lahan yang kurang produktif (lahan tidur).
- c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
- d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.

- e. Distribusi tenaga kesehatan ke desa yang masuk dalam prioritas 1-3.

b. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Indikator

Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Indikator disebabkan oleh tiga Faktor yakni :

Faktor Penunjang :

1. Perda No. 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian berkelanjutan;
3. Program dan Kegiatan dari Pusat dan Propinsi;

Faktor Penghambat :

1. Luas Lahan Sawah Pertanian yang mengalami penurunan;
2. Daya beli masyarakat terbatas karena kemiskinan;
3. Terbatasnya akses terhadap air bersih;
4. Distribusi tenaga kesehatan yang belum terdistribusi secara merata;
5. OPD yang terkait dalam pencapaian ketahanan pangan belum menjadikan Lokasi rawan pangan sebagai lokasi prioritas dalam penyusunan Program dan Kegiatan;
6. Koordinasi antara OPD terkait belum maksimal;

Solusi :

1. Membuka lahan pertanian baru, meningkatkan kapasitas produksi dan mengembangkan potensi pangan lokal;

2. Penyediaan lapangan kerja, mempermudah akses pangan, dan jaring pengaman sosial;
3. Pembangunan Infrastruktur Dasar (air Bersih);
4. Penyediaan Tenaga Kesehatan;
5. Masing – masing OPD yang terkait dalam pencapaian Ketahanan Pangan agar menjadikan lokasi prioritas pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan Peta FSVA.
6. Memaksimalkan Koordinasi antar OPD yang terkait;

c. Program dan Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Ketahanan Pangan

Adapun sejumlah Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran meningkatnya ketahanan pangan, sebagai berikut:

Tabel 11
Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Menunjang Ketahanan Pangan

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	2,000,000,000	1,999,500,000	100
1.1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	2,000,000,000	1,999,500,000	100
1.1.1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	1,900,000,000	1,899,500,000	100

1.1.2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	100,000,000	100,000,000	100
2	PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	509,309,900	509,308,700	100
2.1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	14,538,100	14,538,100	100
2.1.1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	14,538,100	14,538,100	100
2.2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	199,998,000	199,998,000	100
2.2.1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	199,998,000	199,998,000	100
2.3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	294,773,800	294,772,600	100
2.3.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	42,773,800	42,772,600	100
2.3.2	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	252,000,000	252,000,000	100
3	PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	187,454,700	87,394,700	47
3.1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	14,521,900	14,521,900	100
3.1.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	14,521,900	14,521,900	100

3.2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	172,932,800	72,872,800	42
3.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	7,885,900	7,885,900	100
3.2.2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	165,046,900	64,986,900	39
Realisasi (%)		2,696,764,600	2,596,203,400	96

Untuk menunjang pencapaian Sasaran Strategis 1, terdapat Program dan Kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi, dan APBN karena pencapaian Ketahanan Pangan merupakan Program Nasional dan merupakan salah satu Indikator dalam SDGs yakni mengakhiri kelaparan. Pembiayaan yang dilakukan apada APBD yaitu dengan melakukan pengisian lumbung pangan masyarakat, pencatatan harga pangan strategis, penyusunan peta kerentanan dan kerawanan pangan, survey konsumsi masyarakat dan pelaksanaan operasi pasar murah. Beberapa Program Pusat dan Propinsi yang menunjang pencapaian Sasaran Startegis 1 yakni Program Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Yang Berkualitas dengan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar Yakni : Pekarangan Pangan Lestari; Penguatan Keamanan dan Mutu Pangan Segar; Pemetaan Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA); Gerakan Sayang Halaman Rumah (GERSAHARUM), dan pemberlakuan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG), dan Pembangunan Lumbung Pangan.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk kedepannya, jika memungkinkan untuk melaksanakan pencetakan sawah guna meningkatkan

produksi tanaman pangan. Upaya perluasan areal sawah sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan karena kebutuhan produksi tanaman pangan khususnya padi terus meningkat sedangkan alih fungsi lahan cukup luas setiap tahunnya. Untuk mendukung Polewali Mandar sebagai salah satu lumbung pangan Propinsi.

Salah satu upaya dalam mendorong produksi dan produktivitas pangan adalah tersedianya infrastruktur pertanian yang memadai. Pembangunan infrastruktur yang saat ini diperlukan antara lain berupa perbaikan dan pembangunan infrastruktur pengairan, seperti waduk dan saluran irigasi, serta pembangunan jalan yang menghubungkan sentra produksi kepada konsumen akhir.

Untuk mewujudkan ketersediaan infrastruktur tersebut, dukungan dan koordinasi antara instansi yang membidangi pembangunan fisik serta pemerintah daerah melalui dukungan kebijakan yang mempermudah implementasi pembangunan tersebut, mutlak diperlukan. Selain pembangunan infrastruktur, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian juga memerlukan dukungan penyediaan teknologi dan sarana produksi, serta sumber daya manusia yang baik.





SASARAN STRATEGIS 2

MENINGKATNYA KAPASITAS PRODUKSI PERTANIAN

Sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan berbagai program kegiatan pembangunan pertanian diarahkan untuk peningkatan produksi, tapi hal tersebut hanya dapat tercapai dengan dukungan prasarana dan sarana pertanian, melalui pengelolaan lahan dan air, peningkatan akses permodalan bagi petani, penyediaan pupuk pestisida yang memenuhi azas 6 (enam) tepat serta peningkatan pemanfaatan dan fasilitasi penyediaan alat mesin pertanian (alsintan). Selain ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, kontribusi penyuluhan pertanian yang nyata diperlukan untuk mendukung program pemerintah di sektor pertanian untuk mendorong dan membantu petani mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya.

Dukungan prasarana dan sarana pertanian bertujuan untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP), meningkatkan produktivitas dan produksi melalui upaya memperluas lahan pertanian pada kawasan tanaman pangan untuk mengimbangi alih fungsi lahan. Kemudian melakukan upaya rehabilitasi jaringan irigasi, melakukan upaya optimasi lahan, meningkatkan ketersediaan alat dan mesin pertanian, perbaikan distribusi pupuk bersubsidi agar pupuk sampai kepada petani sesuai dengan azas 6 tepat dan bantuan modal petani melalui dana KUR.

a. Realisasi capaian indikator kinerja terhadap Target

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2 berdasarkan hasil pengukuran terhadap pencapaian target indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 13 berikut :

Tabel 12
Target dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	%
2	Meningkatnya kapasitas produksi sektor pertanian	Persentase pertumbuhan produksi padi	0.50%	8%	1,600
		Persentase pertumbuhan produksi jagung	0.50%	203%	40,600
		Persentase pertumbuhan produksi kedelai	0.50%	-87%	(17,400)
		Persentase pertumbuhan produksi buah-buahan	45%	-15%	(33)
		Persentase pertumbuhan produksi sayuran	0.50%	62%	12,400
		Persentase pertumbuhan produksi Kakao	8.5%	0.98%	12
		Persentase pertumbuhan produksi Kelapa	0.50%	0.82%	164
		Persentase pertumbuhan Produksi Kopi	0.50%	0.03%	6

	Persentase pertumbuhan Populasi Sapi	1.5%	0.56%	37
	Persentase pertumbuhan Populasi Kambing	0.50%	0.01%	2
	Persentase pertumbuhan Populasi Unggas	0.50%	0.50%	100

INDIKATOR PERSENTASE PERTUMBUHAN PADI, JAGUNG DAN KEDELAI

Secara umum persentase pertumbuhan produksi pertanian yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dengan capaian – masing-masing sebagai berikut:

b. Perbandingan realisasi terhadap tahun-tahun sebelumnya dan Renstra

Pada Tabel 13 dapat dilihat pencapaian kinerja pada Indikator satu sampai tiga yaitu persentase pertumbuhan produksi padi 8%, jagung 203% dan Kedelai -87% dengan rincian masing-masing produksi komoditi tanaman pangan sebagai berikut :



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

7 Nov 2022 09:47:28

3.43487831S 118.99251053E

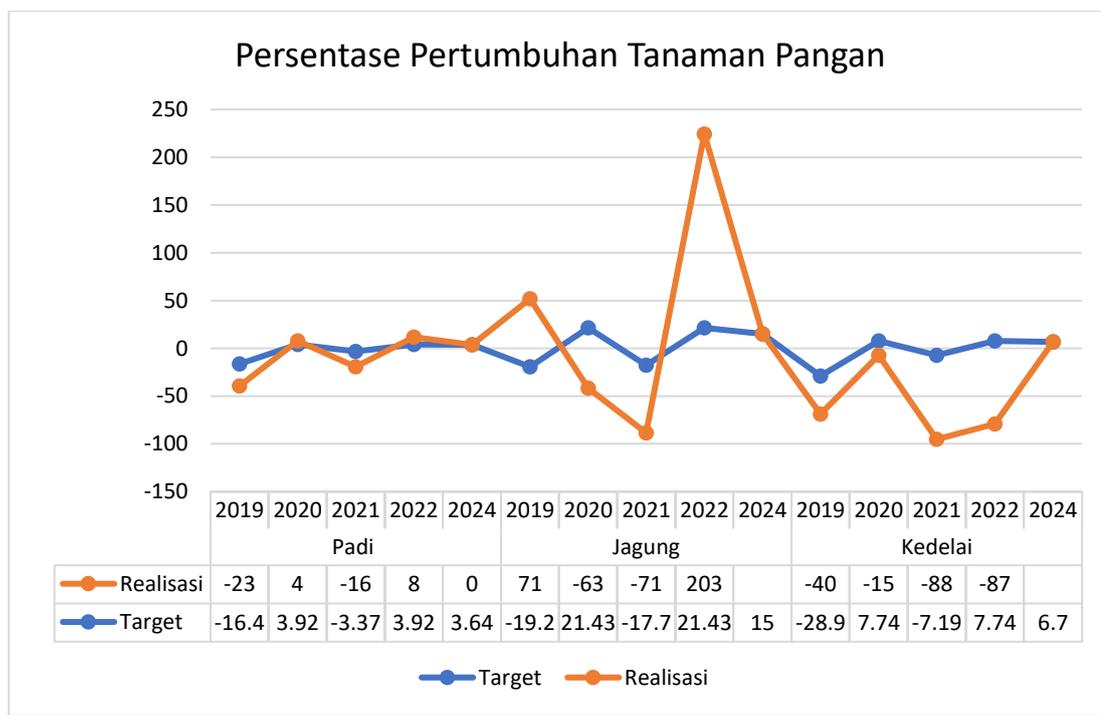
Altitude: 103.8m

Speed: 1.2km/h

Panen Jagung Bersama Ka. BPP ALU di KT MANGGA PERMAI

Index number: 1059

Gambar 6
Capaian Persentase Pertumbuhan Tanaman Pangan dalam Kurung Waktu Empat Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra



Pada Gambar 6. menunjukkan bahwa secara umum persentase pertumbuhan produksi tanaman pangan yaitu padi, jagung dan kedelai dalam kurung waktu empat tahun fluktuatif yaitu untuk tanaman padi tahun 2019 : -23%, 2020 : 4%, 2021 : -16% dan 2022: 8%. Persentase pertumbuhan produksi Jagung tahun 2019: 71%, 2020: -63%, 2021: -71%, 2022: 203% sedangkan untuk kedelai tahun 2019 : -40%, 2020: -15%, 2021: -88% dan tahun 2022: -87%. Untuk komoditi padi dan jagung pada tahun 2022 mengalami peningkatan melebihi target yang telah ditetapkan, hal tersebut dikarenakan adanya beberapa intervensi program yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan yaitu dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana pertanian pada wilayah-wilayah sentra produksi, diantaranya pembangunan sumber-sumber air sebanyak 48 unit yaitu jaringan irigasi

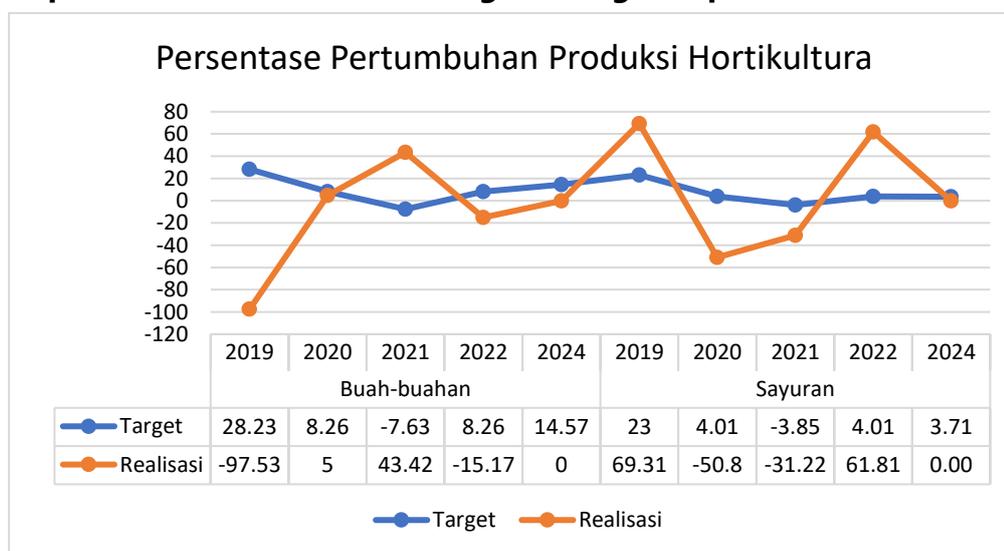
tersier, jaringan irigasi air tanah dalam/dangkal, jaringan irigasi perpompaan/perpipaan, dan pembangunan embung yang bersumber dari dana APBD dan APBN Tahun 2022. Untuk sarannya terdapat pengadaan traktor roda dua sebanyak 13 unit, 3 unit combine harvester dan sprayer punggung 16 unit, Rice Milling Unit dan colour sorter, bantuan benih padi, jagung dan kedelai yang bersumber dari dana APBD dan APBN 2022.

Sedangkan untuk persentase pertumbuhan produksi kedelai terjadi penurunan yang signifikan dikarenakan berkurangnya bantuan benih kedelai yang bersumber dari dana APBN dan kurangnya minat petani dalam budidaya kedelai, sehingga kedepannya diperlukan penyuluhan untuk mendorong petani melakukan budidaya kedelai.

INDIKATOR PERSENTASE PERTUMBUHAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN

Pada tabel 13. Indikator persentase pertumbuhan hortikultura yaitu buah-buahan -15% dan sayuran 62% sebagaimana pada gambar 9 berikut :

Gambar 7
Capaian Persentase Pertumbuhan Hortikultura dalam Kurung Waktu Empat Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra



Pada Gambar 7 menggambarkan persentase peningkatan produksi hortikultura selama empat tahun terakhir 2019, 2020, 2021 dan 2022, yakni terjadi penurunan persentase pertumbuhan hortikultura dari tahun 2021 ke tahun 2022, hal tersebut dikarenakan adanya penurunan produksi buah-buahan yaitu buah mangga yang dikarenakan musim yang tidak mendukung dan serangan lalat buah.

Sedangkan untuk pertumbuhan produksi sayur-sayuran terjadi peningkatan produksi dari -31.22% ke 61.81%, dimana bawang, cabe, tomat dan kacang panjang mengalami peningkatan produksi yang signifikan. Hal tersebut diakibatkan oleh semakin membaiknya kualitas prasarana dan sarana diwilayah sentra pertanaman bawang dan cabe yaitu Kecamatan Limboro, Tinambung dan Balanipa. Untuk tahun 2022 intervensi dari Dinas Pertanian dan Pangan pada sub. Sektor hortikultura berupa pengadaan benih sayuran dan buah-buahan, pembangunan jalan usaha tani 3 unit, pembangunan irigasi air tanah dalam/dangkal 2 unit untuk sub. sektor hortikultura, pengadaan penghalau hama babi sebanyak 52 unit, Sprayer punggung 16 unit, dan pengadaan cultivator 13 unit untuk mempercepat proses pengolahan lahan sehingga penanaman kembali segera dapat dilakukan setelah panen sehingga akan meningkatkan indeks penanaman hortikultura.

Selain hal tersebut di atas, Dinas Pertanian dan Pangan tetap melanjutkan inovasi pengembangan kawasan hortikultura di Desa Salarri Kecamatan Limboro yang telah dilaksanakan mulai tahun 2020 dan akan berlanjut sampai tahun 2025 dengan memaksimalkan sumber-sumber dana dari APBD dan APBN untuk optimasi lahan pertanaman bawang merah dan cabe yang ada, sehingga kelak dapat di replikasi oleh masyarakat setempat dan sekitarnya sehingga komoditi yang mendorong terjadinya inflasi seperti bawang merah dan cabai merah dapat dikendalikan.

Pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari dukungan kegiatan yang bersumber dari APBD maupun APBN, kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan produksi tanaman hortikultura dan menjadi pengendali inflasi di Kabupaten Polewali Mandar.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Indikator

Dalam pencapaian indikator sasaran strategis 2 terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

Faktor Penunjang

1. Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura merupakan sasaran Nasional RPJMN 2020-2024;
2. Adanya Inovasi Pengembangan Kawasan Hortikultura;
3. Adanya dukungan dana APBD dan APBN
4. Tenaga Penyuluh yang tersebar di 16 Kecamatan;

Faktor Penghambat

1. Lahan pertanaman hortikultura belum optimal sepenuhnya untuk kebutuhan sumber-sumber air, akses jalan dan alat mesin pertanian untuk mengolah lahan.
2. Tingginya Serangan Hama dan Penyakit saat curah hujan tinggi.
3. Penggunaan pupuk secara rasional dan berimbang merupakan faktor kunci dalam peningkatan produksi tanaman. Sedangkan rekomendasi pupuk yang berlaku saat ini masih bersifat umum dan belum mempertimbangkan kandungan atau status hara tanah sehingga penggunaan pupuk tidak efisien.

Solusi

1. Melakukan intensifikasi dengan intervensi pembangunan sumber-sumber air, pengembangan jalan pertanian, bantuan alat dan mesin pertanian;
2. Pelatihan pembuatan agensia hayati seperti *Trichoderma* untuk pengendalian hama dan penyakit secara alami;
3. Pemerintah fokus peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, peningkatan indeks pertanaman, tumpangsari dan *integrated farming* menuju *zero waste*;
4. Penguatan akses petani ke input produksi dan lembaga keuangan;
5. Pembentukan Korporasi Petani yang bergerak di bidang tanaman hortikultura;
6. Penyuluhan secara intensif terkait penggunaan pupuk berimbang;
7. Mengembangkan komoditi yang berbasis kawasan (*food estate*) hortikultura yang berbasis pertanian digital.

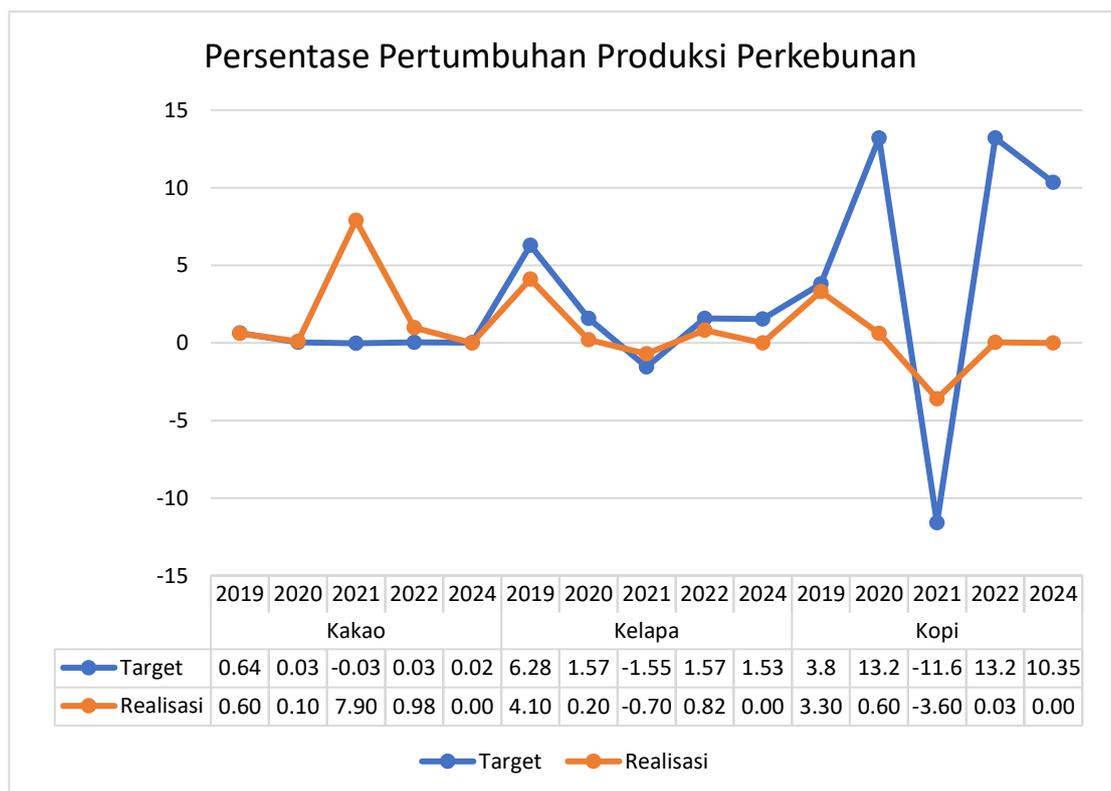




INDIKATOR PERSENTASE PERTUMBUHAN KAKAO, KELAPA DAN KOPI

Pada tabel 12. Indikator persentase pertumbuhan perkebunan yaitu kakao 0.98% , kelapa 0.82% dan kopi 0.03% sebagaimana pada gambar 10 berikut :

Gambar 8
Capaian Persentase Pertumbuhan Produksi Perkebunan dalam Kurung Waktu Empat Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra



Uraian jumlah produksi masing-masing komoditi perkebunan diuraikan sebagai berikut :

1. **Produksi Kakao**

Produksi kakao selama tiga tahun terakhir terjadi peningkatan produksi dari tahun sebelumnya. Persentase pertumbuhan kakao dari tahun 2021 ke 2022 sebesar 0,98 % atau sebesar 36.482,11 ton. Peningkatan jumlah produksi kakao ini dikarenakan setiap tahunnya terdapat kegiatan pengembangan kakao dari dana APBN berupa bantuan bibit kakao dan pupuk. Dari segi pencapaian target produksi yang telah ditentukan, pada tahun 2022 produksi kakao mencapai target hal tersebut dikarenakan pengendalian serangan OPT terus dilakukan dan peremajaan tanaman tua yang sudah tidak produktif.

Berdasarkan data pada Gambar 10 di atas dapat dilihat bahwa peningkatan produksi kakao selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan dengan persentase peningkatan dari tahun ke tahun.

2. **Produksi Kelapa**

Capaian produksi kelapa tahun 2022 mengalami peningkatan dengan persentase sebesar 0.82% atau sebesar 20.015,15 ton dibawah dari target yang telah ditetapkan sebesar 1,57%. Salah satu aspek yang mempengaruhi kurang maksimalnya produksi kelapa adalah terjadi penurunan produksi pada kelapa hibrida. Pohon kelapa hibrida yang ada pada kebun masyarakat rata-rata berumur tua dan belum pernah dilakukan peremajaan karena selama ini bantuan bibit yang bersumber dari APBN hanya jenis kelapa dalam, sehingga ke depannya perlu dilakukan peremajaan kelapa hibrida dengan memberikan bantuan bibit kelapa hibrida kepada masyarakat, selain itu tingginya alih fungsi lahan pada perkebunan kelapa.

3. Kopi

Persentase pertumbuhan produksi Kopi menunjukkan pertumbuhan yang tidak terlalu signifikan yaitu hasil kurang signifikan, yaitu jumlah produksi kopi mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke 2022 sebesar 0,03% ton dari target. Luas areal pertanaman komoditis kopi di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 dan 2022 sama yaitu 2.216,88 Ha yang terdiri dari 1.830,46 Ha untuk Komoditi Kopi Robusta dan 386,42 Ha komoditi kopi arabika. Kecamatan dengan luas areal pertanaman kopi arabika terluas di Kabupaten Polewali Mandar adalah Kecamatan Tutar dengan luas areal pertanaman 663,73 Ha sedangkan areal pertanaman terkecil di Kecamatan Balanipa dengan luas pertanaman 3,70 Ha. Untuk komoditi kopi arabika wilayah dengan luas pertanaman berada di Kecamatan Binuang dengan luas areal 190,90 Ha sedangkan wilayah dengan luas pertanaman terkecil adalah Kecamatan Tapango dengan luas 18,70 Ha. Berikut Gambar yang menunjukkan perkembangan produksi kopi selama tiga tahun terakhir.

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat tren pertumbuhan produksi kopi robusta dan arabika. Produksi kopi tahun 2022 ini disebabkan oleh tingkat serangan OPT yang cukup tinggi dan banyaknya tanaman tua yang sudah tidak produktif sehingga perlu dilakukan proses peremajaan tanaman.

Dinas Pertanian dan Pangan pada Tahun 2022 telah melakukan intervensi pada sub sektor perkebunan berupa pengadaan bibit kakao 7.042 pohon, bibit kopi 2.000 pohon yang bersumber dana APBD serta bibit kakao 100.000 pohon yang bersumber dari dana APBN. Sedangkan untuk prasarana dilakukan pembangunan jalan

produksi 4 unit, irigasi air tanah dalam 2 unit dan pembangunan UPH Kakao dan Gula merah beserta sarananya sebanyak 2 unit untuk meningkatkan nilai tambah komoditi perkebunan. Selain pengadaan sarana dan prasarana juga telah dilakukan pelatihan pada petani dan petugas lapang untuk peningkatan kapabilitas petugas dan petani pelaku usaha.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Indikator

Dalam pencapaian sasaran strategis 6 terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

Faktor Penunjang

1. Peningkatan Produksi Komoditas Kakao, Kopi dan Kelapa merupakan Prioritas Nasional;
2. Ketersediaan dana KUR;
3. Tenaga Penyuluh yang tersebar di 16 Kecamatan;

Faktor Penghambat

1. Bencana alam dan Serangan Hama dan Penyakit pada tanaman Perkebunan;
2. Penggunaan pupuk secara rasional dan berimbang merupakan faktor kunci dalam peningkatan produksi tanaman. Sedangkan rekomendasi pupuk yang berlaku saat ini masih bersifat umum dan belum mempertimbangkan kandungan atau status hara tanah sehingga penggunaan pupuk tidak efisien;
3. Infrastruktur jalan untuk mengangkut hasil panen tidak tersedia pada semua wilayah sentra perkebunan;

4. Alih fungsi lahan perkebunan;
5. Jumlah Tanaman perkebunan yang tua semakin meningkat;

Solusi

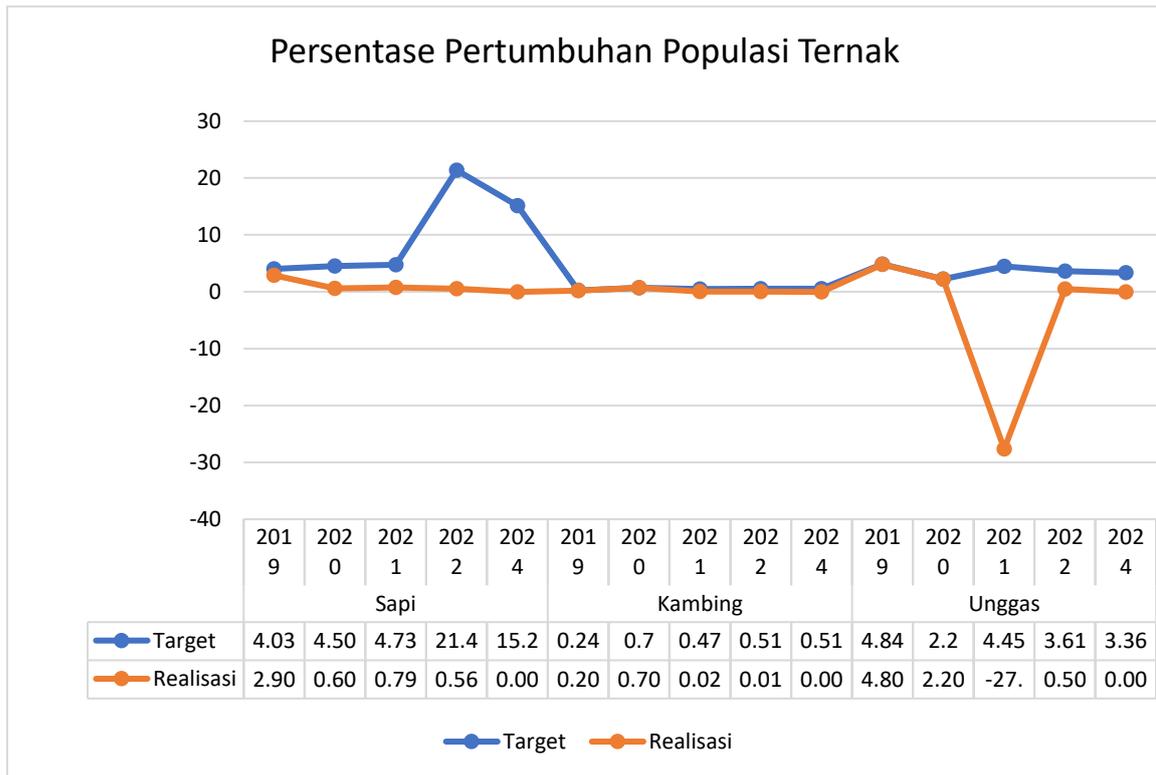
1. Pelatihan Mitigasi Bencana Pertanian;
2. Penyusunan Peta ramalan Hama dan Penyakit dan Pembentukan Brigade Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan;
3. Pemerintah fokus peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam;
4. Penguatan akses petani ke input produksi dan lembaga keuangan;
5. Pembentukan Korporasi Petani yang bergerak di bidang perkebunan;
6. Penyuluhan secara intensif terkait penggunaan pupuk berimbang;
7. Mengembangkan komoditi yang berbasis kawasan perkebunan;
8. Penyusunan Peta Perlindungan Lahan Perkebunan Berkelanjutan;
9. Pelaksanaan Peremajaan tanaman perkebunan;

INDIKATOR PERSENTASE PERTUMBUHAN SAPI, KAMBING DAN UNGGAS

Pada tabel 13. Indikator persentase pertumbuhan peternakan yaitu Sapi 0.56% , Kambing 0.01% dan unggas 0.50% sebagaimana pada gambar 11 berikut :



Gambar 9
Capaian Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak dalam Kurung Waktu Empat Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra



Kebutuhan bahan pangan selain bersumber dari pertanian juga berasal dari peternakan. Kebutuhan konsumsi daging di Provinsi Sulawesi Barat dapat dipenuhi secara lokal. Produksi daging Sulawesi Barat didominasi oleh daging sapi dan kambing dengan nilai produksi cenderung berfluktuatif. Daging sapi paling banyak diproduksi di Kabupaten Polewali Mandar.

Pada Gambar 9. menggambarkan jumlah populasi ternak empat tahun terakhir 2019, 2020, 2021 dan 2022, dari data tersebut di gambarkan bahwa secara keseluruhan terjadi peningkatan Jumlah populasi sapi, kambing dan unggas mengalami peningkatan yang

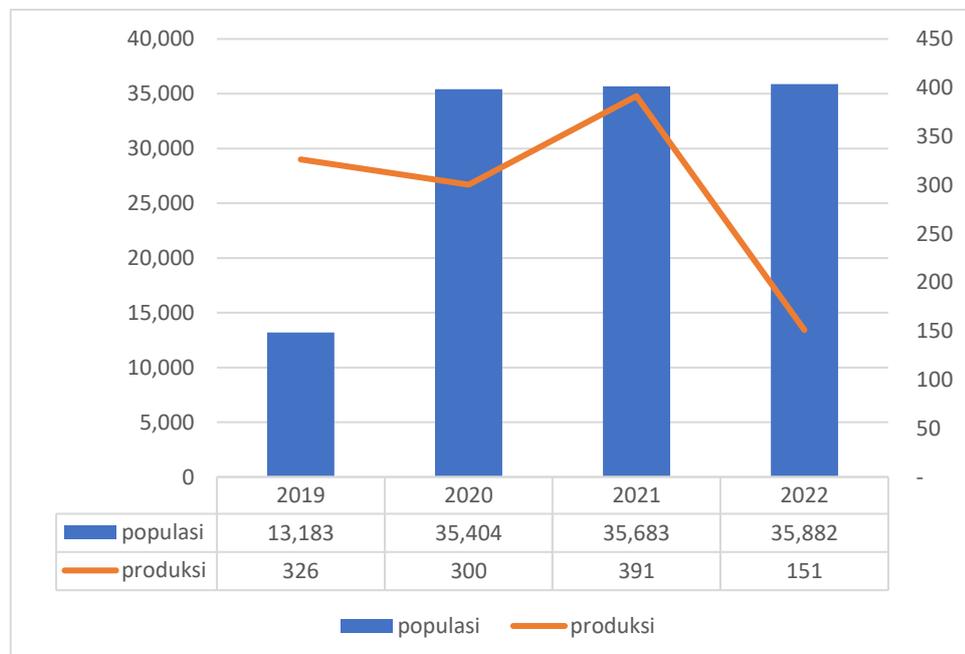
signifikan dibandingkan populasi dua tahun terakhir, namun pada populasi unggas terjadi penurunan yang signifikan pula sebesar 904.659 ekor. Penurunan populasi tersebut mempengaruhi jumlah produksi masing-masing jenis ternak, yang mana untuk produksi sapi, kambing, dan babi mengalami peningkatan dan untuk produksi unggas dan telur mengalami penurunan. Adapun perbandingan realisasi masing-masing produksi diuraikan sebagai berikut:

Perbandingan realisasi terhadap tahun-tahun sebelumnya

1. Ternak Sapi

Berikut disajikan capaian perbandingan target indikator kinerja populasi dan produksi daging sapi selama 4 (empat) tahun terakhir, disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

Gambar 10
Perbandingan Populasi dan Produksi Daging Sapi Tahun 2019-2022



Berdasarkan Gambar 10 di atas menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir populasi dan produksi sapi tidak berbanding lurus antara peningkatan populasi dengan peningkatan produksi, hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2020 terjadi peningkatan populasi namun produksi daging menurun, hal tersebut menandakan bahwa pemotongan yang dilakukan pada tahun 2020 tidak sebanyak dengan pemotongan tahun 2019, hal tersebut diakibatkan pada awal tahun 2020 terjadi pandemi covid 19 yang menyebabkan turunnya permintaan daging dari penjual makanan yang berbahan dasar daging, dikarenakan adanya pembatasan pergerakan bagi masyarakat untuk mencegah penularan covid 19 serta terjadinya penurunan pendapatan masyarakat, sehingga konsumsi daging beralih ke konsumsi daging unggas dan telur sebagai substitusi sumber protein hewani, namun fenomena tersebut tidak berlanjut sampai pada tahun 2021, hal tersebut dapat di gambarkan pada data tahun 2021 yang mana jumlah populasi berbanding lurus dengan jumlah produksi daging sapi, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2021 setelah pelaksanaan vaksinasi covid 19 tahap I dan II, pembatasan pergerakan masyarakat tidak seketat tahun 2020 sehingga menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar yang berdampak pada permintaan daging oleh masyarakat.

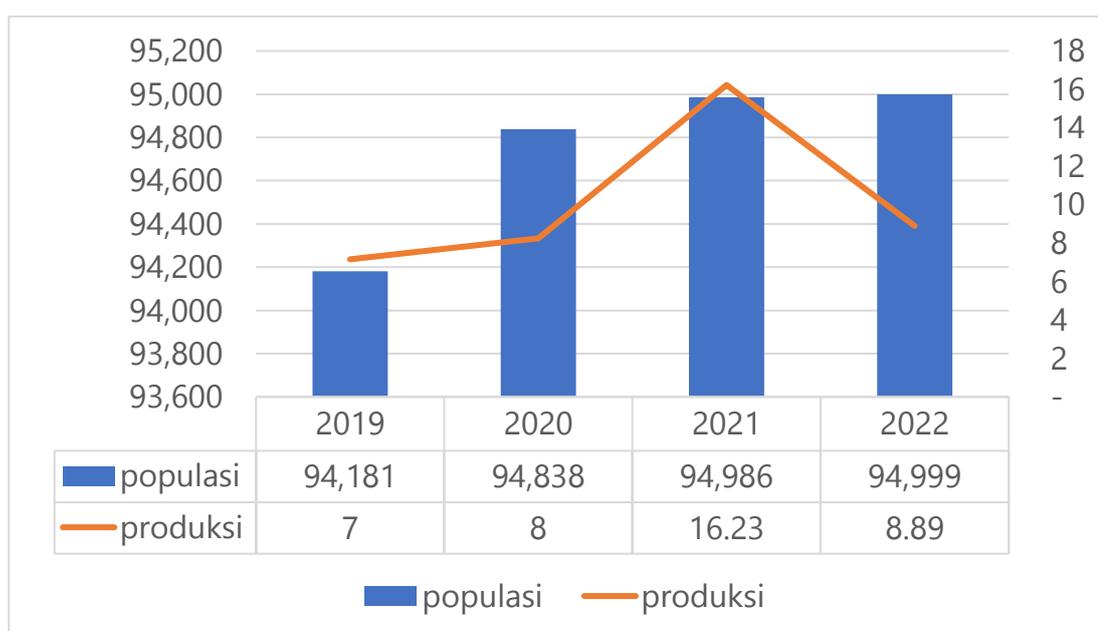
Namun memasuki tahun 2022 terdapat penyakit mulut dan kuku pada sapi di Indonesia sehingga Kabupaten Polewali Mandar melakukan perbatasan pemasukan dan pengeluaran sapi untuk mencegah terjadinya penularan penyakit tersebut. Selain penyakit mulut dan kuku, diakhir tahun 2022 juga terdapat penyakit Jembrana.

Hal tersebut menyebabkan penurunan pemotongan sapi, sehingga berdampak pada produksi sapi pada tahun 2022. Pemotongan pada tahun ini yang dilakukan di RPH sebanyak 478 ekor.

2. Ternak Kambing

Berikut disajikan capaian perbandingan target indikator kinerja populasi dan produksi daging kambing selama 4 (empat) tahun terakhir, disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

Gambar 11
Perbandingan Populasi dan Produksi Daging Kambing Tahun 2019-2022



Pada Gambar 11 disajikan data populasi dan produksi daging kambing selama empat tahun terakhir 2019-2022, dari grafik tersebut digambarkan selama tiga tahun terakhir pertumbuhan populasi dan produksi berjalan lurus, namun pada tahun 2022 meskipun terjadi peningkatan populasi yang tidak signifikan tapi tidak disertai dengan peningkatan produksi kambing. Jumlah pemotongan kambing yang menurun menyebabkan produksi yang rendah hal tersebut

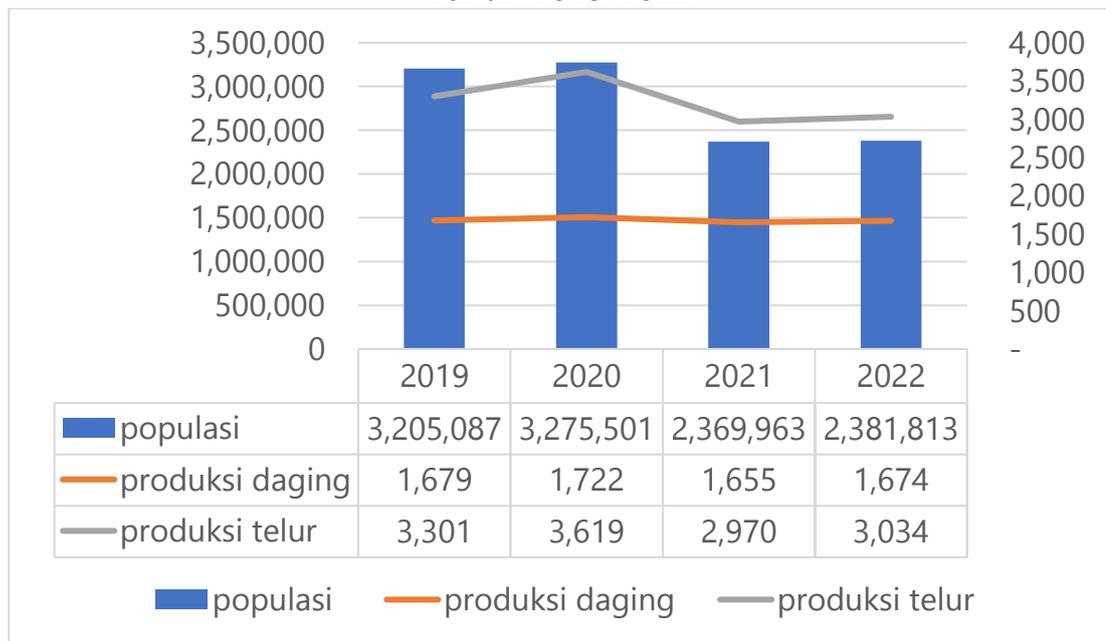
diakibatkan kambing yang dijual keluar lebih banyak daripada dikonsumsi dalam daerah, karena masyarakat lebih memilih mengkonsumsi daging ayam dan telur daripada daging sapi dan kambing. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat.

2. Ternak Unggas

Perbandingan realisasi terhadap tahun-tahun sebelumnya

Berikut disajikan capaian perbandingan target indikator kinerja produksi daging unggas selama 4 (empat) tahun terakhir, disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

Gambar 12
Perbandingan Populasi dengan Produksi Daging Unggas dan telur
Tahun 2019-2022



Berdasarkan Gambar 12. diatas dijelaskan bahwa peningkatan populasi dan produksi daging unggas selama tiga tahun terakhir

2019-2022 mengalami penurunan populasi dan produksi pada tahun 2021 hal tersebut dikarenakan saat memasuki tahun 2022 sebagian masyarakat beralih ke konsumsi daging Sapi, namun memasuki tahun 2022 mulai terjadi peningkatan populasi yang diikuti dengan jumlah produksi dan telur.

Berbeda dengan daging sapi dan daging kambing, daging unggas tahun 2022 permintaan daging unggas cukup meningkat khususnya di Kabupaten Polewali Mandar hal ini disebabkan antara lain harga daging unggas jauh lebih murah dibandingkan harga daging ternak besar dan ternak kecil selain itu populasi ternak unggas juga mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini disebabkan minat masyarakat memelihara ternak unggas meningkat di tahun ini. Salah satu alasan karena waktu pemeliharaan ternak unggas juga lebih singkat dibanding ternak besar dan ternak kecil. Salah satu penyebab meningkatnya produksi telur unggas karena tingkat permintaan masyarakat juga semakin meningkat.

Pencapaian kinerja di bidang Peternakan berupa jumlah populasi dan produksi ternak dapat terus dipertahankan dari tahun ke tahun dengan dukungan dari segi kesehatan hewan dan optimalisasi reproduksi, kegiatan pelaksanaan tersebut dibahas lebih lanjut sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Inseminasi Buatan

Kegiatan penyediaan layanan Inseminasi Buatan (IB) merupakan kegiatan untuk mengembangkan ternak melalui Program Inseminasi Buatan (IB) untuk ternak sapi, kegiatan tersebut didukung melalui dana APBN, APBD Propinsi dan Kabupaten. Pendanaan melalui APBN

dengan penyediaan semen beku, N2 Cair dan honor petugas IB, sedangkan dari APBD mendukung dengan melakukan penambahan dosis N2 cair sebanyak 635 Liter, dari pengadaan tersebut untuk tahun 2022 menghasilkan jumlah kelahiran hasil IB sebanyak 1.576 ekor yang menambah jumlah populasi ternak sapi.

2. Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak.

Pelaksanaan kegiatan ini mencakup pelayanan kesehatan hewan yang bersifat preventif, kuratif, suportif dan rehabilitatif dalam rangka pengendalian penyakit hewan menular di wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Dalam Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, dijabarkan bahwa Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) merupakan penyakit hewan yang menginfeksi hewan/ternak yang dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis bagi peternak khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, menimbulkan keresahan masyarakat serta menimbulkan kematian hewan yang tinggi. Penyakit hewan lainnya yang berdampak zoonosis, menular dan membahayakan kesehatan manusia seperti penyakit Antraks, *Highly Pathogenic Avian Influenza* (flu burung unggas), Rabies, Brucellosis, Hog Cholera pada ternak babi.

Data pelayanan kesehatan hewan pada UPTD Kesehatan Hewan tahun 2012 sampai dengan tahun 2023, bersumber dari data i-SIKHNAS (integrated-Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional) yang memiliki server pada Subdit Pengamatan Penyakit Hewan (P2H) Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementrian Pertanian RI, menggambarkan bahwa

kabupaten Polewali Mandar merupakan wilayah endemik penyakit Brucellosis pada ternak sapi, HPAI pada ternak unggas, Rabies pada hewan penular Rabies, serta 14 Maret 2016 dinyatakan sebagai daerah tertular antraks yang mana wabah ini menyerang ternak sapi sebanyak 35 ekor dan kambing sebanyak 20 ekor di desa Gattungan dan desa Lagi Agi, Kecamatan Campalagian serta desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo. Bulan Oktober tahun 2022, Penyakit Mulut dan Kuku yang sebelumnya tidak di temukan lagi di Indonesia, telah terdeteksi di dua desa/kel di kecamatan Luyo kabupaten Polewali Mandar dan menyerang ternak sapi dan kambing. Penyakit re-emerging disease ini kembali ditemukan di Propinsi Aceh dan Jawa Timur di awal tahun 2022. Demikian halnya penyakit Jembaran yang belum pernah di temukan di pulau Sulawesi, telah ditemukan menginfeksi ternak sapi milik peternak di Kabupaten Polewali Mandar pada bulan Agustus 2022 lalu.

Program pengendalian telah dilaksanakan dengan dukungan pemerintah pusat, propinsi dan pemerintah daerah dalam rangka mitigasi dan mencegah transmisi penyebaran penyakit hewan ini. Kegiatan pengendalian dan pencegahan yang telah dilaksanakan meliputi kegiatan pengobatan massal, pencegahan penyebaran vektor penyakit dan memutus mata rantai virus dengan desinfeksi massal kandang ternak milik warga, komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) melalui media massa, media on line dan peningkatan kewaspadaan dengan menyebarkan leaflet dan media informasi berupa poster atau flyer pada fasilitas umum dan juga sarana ibadah.

Realisasi cakupan layanan kesehatan hewan yang dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan melalui UPTD Kesehatan Hewan melalui

program pengendalian penyakit hewan menular, salah satunya adalah kegiatan vaksinasi dan pengobatan antraks pada ternak sapi, kambing dan kuda untuk mencegah munculnya kembali wabah penyakit Antraks yang telah terkendali pada tahun 2016 silam. Dukungan pelaksanaan vaksinasi di peroleh melalui dana APBN dan APBD Propinsi dan Kabupaten. APBN menyiapkan vaksin dan biaya operasional serta APBD menunjang dari penyediaan alat kesehatan dan obat – obatan hewan yang mendukung program vaksinasi yang dilaksanakan pada 41 desa/kelurahan pada 5 kecamatan yang merupakan daerah beresiko sampai 60 tahun ke depan.

Kegiatan penanggulangan PHMS merupakan salah satu bagian dari Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak melalui pengadaan vaksinasi yang terdiri dari vaksinasi rabies, biaya operasional vaksinasi serta obat-obatan ternak yang digunakan dalam pencegahan dan penanggulangan PHMS yang juga merupakan subsidi dari APBN dan APBD Propinsi dan kabupaten setiap tahunnya meskipun mengalami penurunan target diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya jumlah layanan vaksinasi antraks dan rabies.

Berikut data target dan realisasi vaksinasi antraks tahun 2016 hingga tahun 2022, tersaji dalam Tabel 13 di bawah ini :

Tabel 13
Target dan Realisasi Vaksinasi dan Pengobatan Antraks
Tahun 2016 - 2022

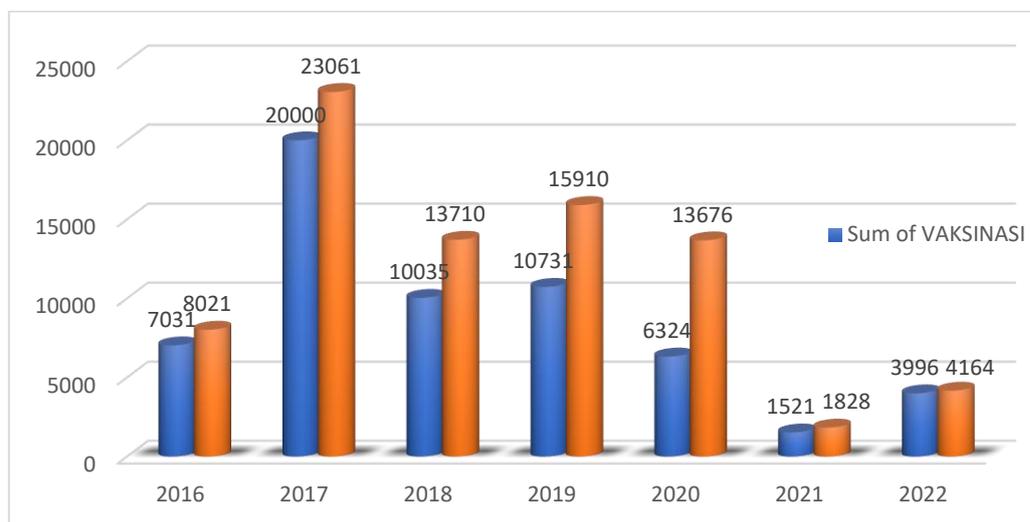
TAHUN	TARGET		REALISASI		SUMBER DANA
	VAKSINASI	PENGOBATAN	VAKSINASI	PENGOBATAN	
2016	10,000	10,000	7,031	8,021	APBD II
2017	20,000	20,000	20,000	23,061	APBN
2018	10,000	10,000	10,035	13,710	APBN
2019	20,000	10,000	10731	15910	APBN
2020	10,000	10,000	6,324	13676	APBN
2021	1,500	1,000	1,521	1,828	APBN
2022	7,800	0	3,996	4,164	APBN

Sumber data : i-SIKHNAS 2022

Data tahun 2022 menunjukkan peningkatan jumlah ternak yang divaksinasi dibandingkan tahun 2021 yaitu 1.521 ekor menjadi 3.996 ekor sedangkan untuk pengobatan antraks juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu 1.828 ekor menjadi 4.164 ekor. Hal ini dikarenakan keadaan yang mulai kondusif dari kasus covid 19 dibandingkan pada tahun 2021, sehingga petugas lapangan leluasa melaksanakan vaksinasi dan pengobatan.



Gambar 13
Grafik Realisasi Vaksinasi dan Pengobatan Antraks
Tahun 2016-2022



Sumber data : i-SIKHNAS 2022

Data pelaksanaan vaksinasi Rabies pada Hewan Penular Rabies pada tahun 2019- 2022 di Kabupaten Polewali Mandar, dapat dilihat pada Tabel 14 berikut ini :

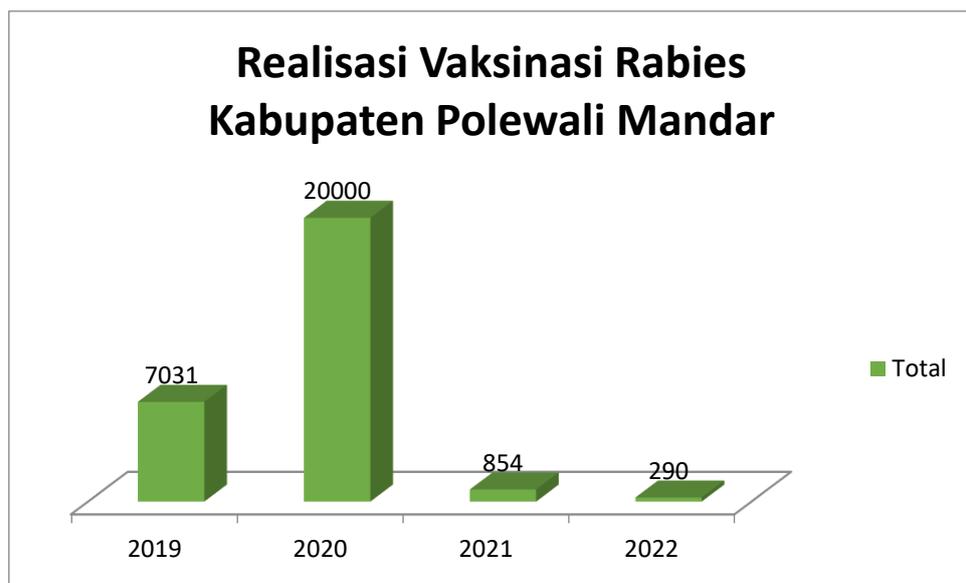
Tabel 14
Target dan Realisasi Vaksinasi Rabies Tahun 2019-2022

TAHUN	TARGET	REALISASI	SUMBER
	VAKSINASI	VAKSINASI	DANA
2019	2,000	7,031	APBN
2020	500	20,000	APBN
2021	700	854	APBN
2022	200	290	APBN

Sumber data : i-SIKHNAS 2022

Jumlah HPR yang dapat divaksin pada tahun 2021, juga mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19, dari tahun sebelumnya 2020 dapat tervaksin sebanyak 20.000 ekor HPR, namun pada tahun 2021 hanya bisa tervaksin 854 ekor dikarenakan keterbatasan vaksin dan biaya operasional, demikian juga untuk tahun 2022 diakibatkan oleh munculnya Penyakit Mulut dan Kuku. Berikut grafik perbandingan target dan realisasi capaian program pemberantasan penyakit Rabies Tahun 2019-2022 sebagaimana Gambar di bawah ini :

Gambar 14
Grafik Realisasi Vaksinasi Rabies Tahun 2019 – 2022



Sumber data : i-SIKHNAS 2022

Cakupan vaksinasi Rabies masih jauh dari upaya proteksi yang diharapkan, mengingat bahwa pelayanan vaksinasi ini hanya dilakukan di 8 desa/kelurahan dibanding dengan jumlah populasi hewan penular rabies di 16 kecamatan di wilayah kerja Kabupaten Polewali Mandar.

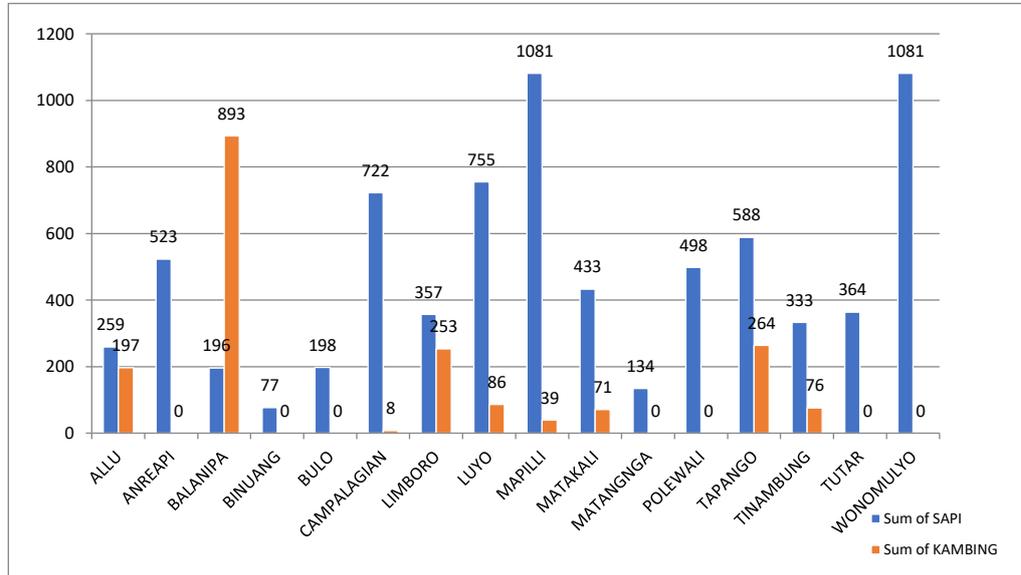
Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) masuk kembali ke Indonesia pada Bulan April 2022 sejak Indonesia Bebas PMK. Sesuai dengan karakter penyakitnya, PMK menyebar dengan sangat masif dan cepat, sehingga banyak kabupaten dan kota di Indonesia yang sudah menjadi area merah atau terinfeksi, tak terkecuali kabupaten Polewali Mandar. Berikut data pelaksanaan vaksinasi PMK pada ternak berpotensi terinfeksi PMK pada tahun 2022-2023 di Kabupaten Polewali Mandar, dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini berikut ini :

Tabel 15
Pelaksanaan Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku Tahun 2022

KECAMATAN	JENIS TERNAK (EKOR)	
	SAPI	KAMBING
TAPANGO	588	264
WONOMULYO	1081	0
MAPILLI	1081	39
LUYO	755	86
BINUANG	77	0
ANREAPI	523	0
POLEWALI	498	0
MATAKALI	433	71
CAMPALAGIAN	722	8
BALANIPA	196	893
LIMBORO	357	253
TINAMBUNG	333	76
ALLU	259	197
TUTAR	364	0
BULO	198	0
MATANGNGA	134	0

Sumber data : i-SIKHNAS 2022

Gambar 15
Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku Tahun 2022



3. Pengawasan Lalu Lintas Ternak

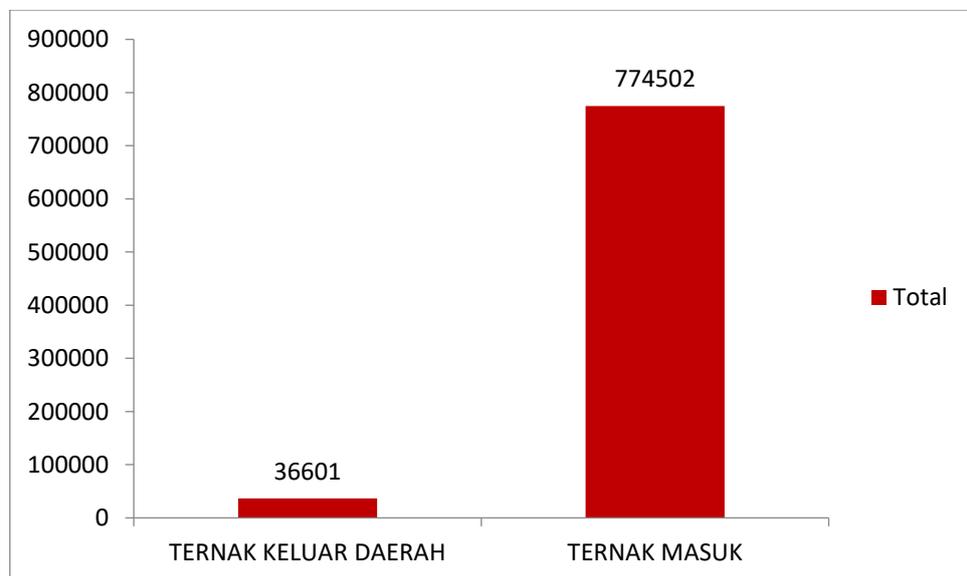
Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan pada Pasal 17 ayat 3 mengatur tentang pembatasan dan pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang berkaitan dengan wabah penyakit hewan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan. Kabupaten Polewali Mandar merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Propinsi Sulawesi Selatan, sehingga perlu diupayakan Pengawasan lalu lintas ternak setiap hari di Pos Jaga perbatasan daerah Pinrang-Polman, untuk mencegah penularan penyakit ternak antar daerah atau antar pulau yang berpotensi dibawa oleh hewan/ternak yang diangkut.

Petugas lalu lintas ternak Dinas Pertanian dan Pangan sejumlah 7 orang petugas, diharapkan dapat melakukan pengawasan ternak yang masuk keluar dan melintas di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, pemeriksaan dokumen sertifikat veteriner (SKKH) ternak yang masuk,

keluar dan melintas, pencatatan jumlah dan jenis komoditas ternak yang disuplai (masuk, keluar dan melintas) serta desinfeksi kendaraan pengangkut ternak.

Berikut data jumlah ternak yang masuk dan keluar wilayah Polewali Mandar, tersaji pada Grafik di bawah ini :

Gambar 16
Grafik Jumlah Ternak Masuk dan Keluar Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022

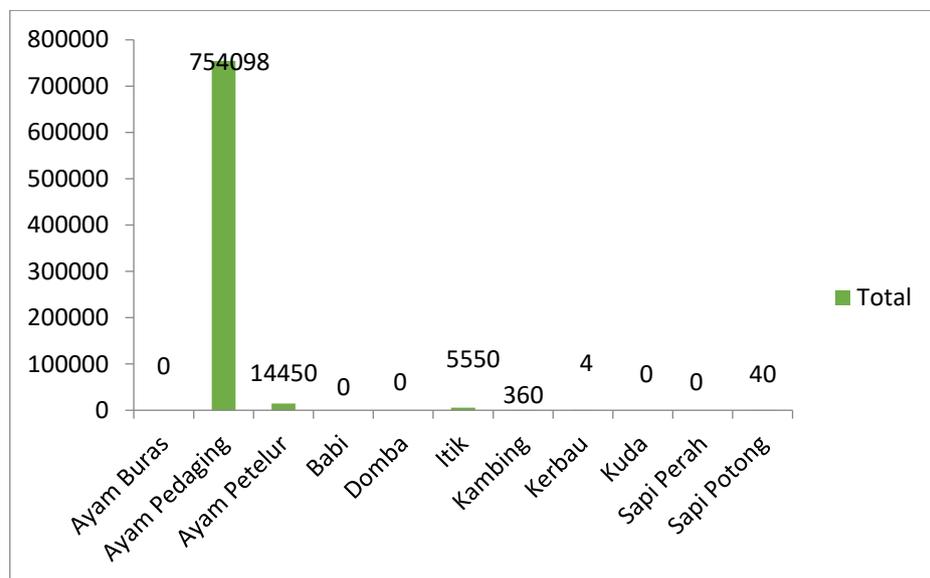


Ragam ternak yang masuk masuk ke wilayah kabupaten

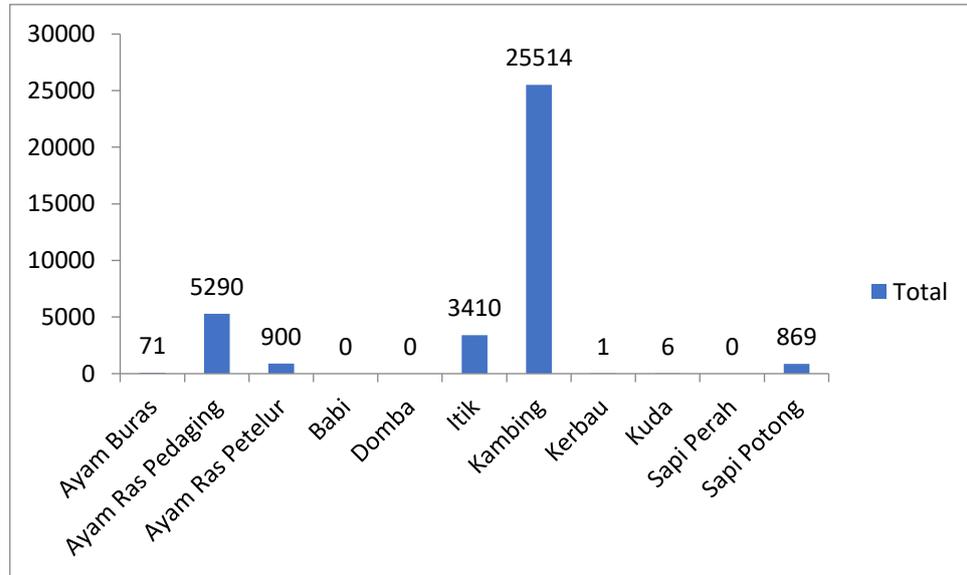


Polewali Mandar di dominasi oleh komoditi ternak yang dikonsumsi masyarakat untuk kebutuhan daging harian. Grafik ragam ternak tersaji pada grafik berikut ini :

Gambar 17
Grafik Ragam Ternak yang Masuk Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022



Gambar 18
Grafik Ragam Ternak yang Keluar Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022



4. Pengawasan Pemotongan Ternak dan Pemasaran Pangan Asal Hewan (PAH)



Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mencakup pemotongan hewan serta pemasaran pangan asal hewan di Kabupaten Polewali Mandar. Untuk mengetahui perbandingan capaian jumlah pemotongan hewan baik yang dilakukan di RPH maupun diluar RPH, selama 3 (tiga) tahun.

Secara keseluruhan pemotongan ternak yang dilakukan diluar rumah potong hewan (DRPH) jauh lebih banyak dibanding jumlah pemotongan ternak yang dilakukan di RPH. Pemotongan ternak yang dilakukan di RPH setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Jumlah

pemotongan ternak yang dilakukan RPH tahun 2020 yakni 1.028 Ekor meningkat dibanding dua tahun terakhir dengan persentase penurunan 44,99%.

Selain kegiatan pengawasan terhadap pemotongan ternak pihak UPTD RPH juga melakukan kegiatan pengawasan dan pembinaan di bidang pemasaran pangan asal hewan (PAH). Ada beberapa pelaku usaha di Kabupaten Polewali Mandar yang berkecimpung di bidang peternakan khususnya yang menyangkut sektor pengolahan pangan asal hewan (PAH). Kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pihak UPTD RPH berupa sosialisasi maupun kunjungan langsung ke lokasi pelaku usaha terkait mengenai pengolahan pangan asal hewan (PAH).

Meningkatkannya indikator kinerja populasi ternak dari tahun ke tahun di Kabupaten Polewali Mandar tidak terlepas dari dukungan berbagai program kegiatan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

5. Pengadaan Bibit Hijauan Ternak

Untuk mendukung kualitas pakan ternak di Kab. Polewali mandar dilakukan pengadaan varietas pakan ternak untuk di budidayakan oleh kelompok-kelompok tani yang bergerak pada usaha budidaya ternak dan pembangunan bank pakan silase melalui dana APBD.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran 2 telah dilakukan intervensi di sub. Sektor peternakan dengan pengadaan irigasi air tanah dangkal 3 unit, jalan usaha tani 7 unit, pengembangan bank pakan silase 5 unit, pengadaan sapi bali 70 ekor, pengadaan kambing 50 ekor, pengadaan obat-obatan, dan

penyelamatan sapi betina produktif dalam upaya peningkatan populasi ternak.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Indikator

Dalam pencapaian sasaran strategis 4 terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

Faktor Penunjang

1. Peningkatan Produksi ternak merupakan sasaran Nasional RPJMN 2020-2024;
2. Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak;
3. Tersedianya Asuransi Usaha Tani khusus Ternak Sapi;
4. Tersedianya Pembiayaan KUR;
5. Tenaga Penyuluh yang tersebar di 16 Kecamatan;

Faktor Penghambat

1. Banyaknya pemotongan betina Produktif;
2. Banyaknya pemotongan yang berada di luar RPH;
3. Banyaknya ternak yang berkeliaran;
4. Keterbatasan tenaga kesehatan hewan untuk menangani 16 Kecamatan;

Solusi

1. Mengurangi pemotongan ternak betina produktif dengan menyiapkan sapi pengganti untuk dipotong.
2. Penertiban pemotongan diluar RPH bersama petugas teknis PKH, pengawas kemavet dan Polisi Pamong Praja;
3. Mengintensifkan Sosialisasi dan Pengawasan ternak liar;

4. Pengembangan Desa Korporasi Sapi;

c. Program dan Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran meningkatnya persentase ketersediaan prasarana dan sarana pertanian, sebagai berikut:

Tabel 16
Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Menunjang Pencapaian Sasaran 2

No.		PAGU	REALISASI	%
5	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	7,545,246,500	7,465,384,500	27
5.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3,414,036,900	3,414,036,900	100
5.1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	852,766,800	852,766,800	100
5.1.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2,561,270,100	2,561,270,100	100
5.2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	644,427,300	644,427,000	100
5.2.1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	151,470,100	151,469,800	100
5.2.2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	60,747,300	60,747,300	100
5.2.3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	432,209,900	432,209,900	100
5.3	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak	84,060,600	84,060,600	100

	Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
5.3.1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	84,060,600	84,060,600	100
5.4	Penyediaan Benih/Bibit dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota Lain	3,402,721,700	3,322,860,000	98
5.4.1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1,882,845,900	1,882,815,900	100
5.4.2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1,519,875,800	1,440,044,100	95
6	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8,822,875,900	8,793,044,201	100
6.1	Pengembangan Prasarana Pertanian	151,230,900	151,230,900	100
6.1.1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	88,937,700	88,937,700	100
6.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	62,293,200	62,293,200	100
6.2	Pembangunan Prasarana Pertanian	8,671,645,000	8,641,813,301	100
6.2.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	4,088,289,000	4,088,289,000	100
6.2.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1,921,052,000	1,921,052,000	100
6.2.3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	1,800,000,000	1,770,168,501	98

6.2.4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	862,304,000	862,303,800	100
7	PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	395,610,200	395,610,200	100
7.1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	77,010,700	77,010,700	100
7.1.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	77,010,700	77,010,700	100
7.2	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	117,000,000	117,000,000	100
7.2.1	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	117,000,000	117,000,000	100
7.3	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	81,599,600	81,599,600	100
7.3.1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	81,599,600	81,599,600	100
7.4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	119,999,900	119,999,900	100
7.4.1	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	119,999,900	119,999,900	100
8	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	239,834,000	239,808,000	100
8.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	239,834,000	239,808,000	100
8.1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	179,734,100	179,708,100	100
8.1.2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	30,099,900	30,099,900	100

8.1.3	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	30,000,000	30,000,000	100
9	PERIZINAN USAHA PERTANIAN	155,500,140	155,500,140	100
9.1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	125,500,440	125,500,440	100
9.1.1	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	55,399,900	55,399,900	100
9.1.2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	19,249,000	19,249,000	100
9.1.3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	50,851,540	50,851,540	100
9.2	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	29,999,700	29,999,700	100
9.2.1	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	29,999,700	29,999,700	100
10	PENYULUHAN PERTANIAN	1,675,127,100	1,675,127,100	
10.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1,675,127,100	1,675,127,100	100
10.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1,386,800,100	1,386,800,100	100
10.1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	148,738,000	148,738,000	100
10.1.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	76,124,400	76,124,400	100
10.1.4	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	63,464,600	63,464,600	100
Rata-rata Capaian Kinerja (%)		18,834,193,840	18,724,474,141	99

Program dan kegiatan yang diselenggarakan melalui dana APBD untuk tahun 2022 telah dilakukan pembangunan jalan pertanian dan pengadaan alat mesin pertanian berupa cultivator, traktor roda dua dan roda empat, pengadaan bibit hortikultura dan perkebunan. Sedangkan dari APBN yaitu Tugas Pembantuan Pusat dan DAK fisik terdapat pembangunan Jalan usaha tani, pembangunan sumber-sumber air dan pengadaan alsintan.

Permintaan usulan kelompok tani berupa pengajuan proposal ke Dinas Pertanian dan Pangan terhadap pengadaan Prasarana dan sarana pertanian sangat tinggi dan tidak dapat diakomodir secara langsung melalui dana APBD dikarenakan terbatasnya alokasi anggaran. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut Dinas Pertanian dan Pangan aktif berkoordinasi ke Pusat untuk mendapatkan dana APBN, dengan menyiapkan persyaratan dari pusat dan rutin mengusulkan proposal kelompok tani melalui aplikasi e-proposal untuk dana APBN, aplikasi Krisna untuk dana yang bersumber dari DAK Fisik.





SASARAN STRATEGIS 3
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 17.
Target dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	%
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	BB	100
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	95.56%	100.00%	105
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Sangat Baik	100

Indikator 1 :
Predikat SAKIP Perangkat Daerah



Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Di tingkat Perangkat Daerah, juga diimplementasikan Perencanaan Kinerja berupa penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA,

Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Perencanaan Kinerja dilakukan secara berjenjang. Demikian pula halnya dengan pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator sasaran, dan target yang diperjanjikan. Selanjutnya pada akhir tahun dilakukan penyusunan Laporan Kinerja berupa LAKIP dan diakhiri dengan rewiuw oleh Inspektorat. Hasil evaluasi bahwa Dinas Pertanian dan pangan, memperoleh nilai 72,38 atau predikat rating "BB". Rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut :

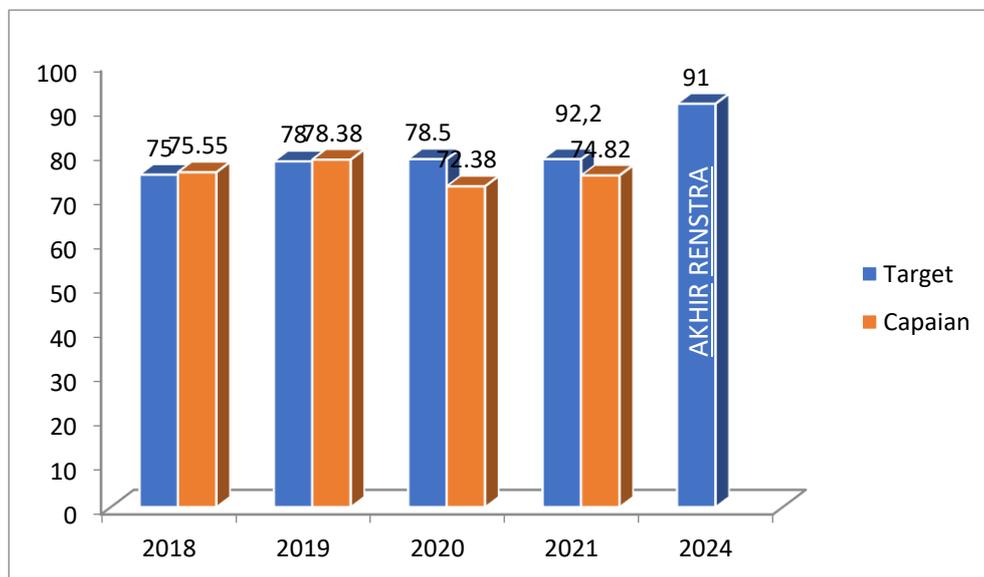
Tabel 18
Hasil Evaluasi LAKIP Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021

No	Komponen Yang Dinilai	2018		2019		2020		2021	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	28.35	30	29.15	30	29.15	30	29.15
2	Pengukuran Kinerja	25	22.81	25	22.19	25	22.19	25	22.19
3	Pelaporan Kinerja	15	11.32	15	10.34	15	10.34	15	10.61
4	Evaluasi Internal	10	4.37	10	5.2	10	5.2	10	5.62
5	Capaian Kinerja	20	8.5	20	11.5	20	5.5	20	7.25
	Nilai Hasil Evaluasi	100	75.35	100	78.38	100	72.38	100	74.82
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	BB		BB		BB		BB	

Mencermati perkembangan capaian implementasi SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana tersaji pada tabel tersebut di atas, maka kualitas penerapan SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan dari tahun 2018

sampai 2021 dengan predikat yang sama yakni BB, namun terdapat peningkatan nilai yakni dari 72,38 menjadi 74,82, terdapat peningkatan nilai sebesar 2,44 poin pada tiga komponen yaitu pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2021 predikat kinerja Dinas Pertanian dan Pangan sangat baik dan mampu melakukan efisiensi anggaran sebesar 5%, untuk kedepannya capaian kinerja organisasi harus terus ditingkatkan dengan dukungan masing-masing bidang agar hasil evaluasi LAKIP dapat mencapai predikat A. Perbandingan pencapaian target dan realisasi tahun 2021 serta tahun sebelumnya serta pencapaian terhadap akhir Renstra digambarkan pada Gambar 26 berikut :

Gambar 19
Perbandingan Capaian LAKIP Dalam Kurung Waktu Empat Tahun
Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra



Analisis keberhasilan dan kegagalan

Faktor Penunjang :

1. Optimalnya pendampingan dan penguatan SAKIP oleh Bagian Organisasi, Bappeda, dan Inspektorat.
2. Tersedianya aplikasi e-SAKIP

Faktor Penghambat :

1. Belum optimalnya evaluasi pencapaian target kinerja per triwulan pada masing-masing Unit Organisasi intern Dinas Pertanian dan pangan, sehingga tidak terdapat langkah-langkah percepatan pencapaian target kinerja tahun yang bersangkutan.

Solusi :

1. Peningkatan pelaksanaan FGD untuk percepatan pencapaian target kinerja.
2. Penyusunan standar kelengkapan data-data kinerja organisasi

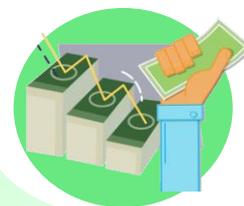
Sejumlah Program dan Kegiatan untuk menjamin pencapaian indikator predikat SAKIP perangkat daerah ini, sebagai berikut :

Tabel 19
Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Menunjang
Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
4	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21,244,914,403	21,075,782,047	99
4.1	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27,580,600	27,580,600	100
4.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,224,800	2,224,800	100
4.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19,505,800	19,505,800	100
4.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,850,000	5,850,000	100
Rata-rata Capaian Kinerja (%)		27,580,600	27,580,600	100

Pelaksanaan penganggaran Program, kegiatan dan Sub. Kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran **kualitas akuntabilitas kinerja** telah memprioritaskan untuk mengatasi faktor penghambat pencapaian kinerja organisasi yakni pada rincian kode rekening kegiatan, yang selama ini hanya berisi belanja cetak dan penggandaan, saat ini telah ditambahkan biaya penunjang pelaksanaan pertemuan intern Dinas untuk membahas penyusunan Renstra, Renja RKA/DPA sampai pada penyusunan LAKIP agar masing-masing unit kerja mengetahui alur dan Proses implementasi SAKIP, sehingga penyusunan dokumen terkait perencanaan tidak terkesan merupakan tanggung jawab Jabatan fungsional Perencana saja.

**Indikator 2 :
Persentase tertib pengelolaan
keuangan dan aset perangkat daerah**



Pada aspek sasaran strategis ini, diharapkan Dinas Pertanian dan Pangan turut menjadi bagian pencapaian Opini Pengelolaan Keuangan BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Memperhatikan capaian Opini BPK dimaksud dalam 2 tahun terakhir yang selalu mencapai WTP, maka diharapkan pencapaian WTP untuk tahun anggaran 2022 ini dapat kembali mencapai WTP. Hasil opini BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar masih dalam proses pemeriksaan BPK, namun dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan turut menjadi Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pencapaian Opini WTP.

Analisis keberhasilan dan kegagalan

Faktor Penunjang :

1. Tingginya komitmen seluruh jajaran pegawai Dinas Pertanian dan Pangan untuk mencapai WTP atau tidak adanya temuan kerugian negara dan penyimpangan administrasi dan sistem prosedur.
2. Tersedianya aplikasi SIMDA dan SIPD yang memudahkan tertib pengelolaan keuangan daerah.

Faktor Penghambat :

1. Belum optimalnya pemahaman akuntansi berbasis akrual SDM Pengelola Keuangan.
2. Belum optimalnya tertib administrasi asset.

Solusi :

1. Mengoptimalkan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Keuangan dalam rangka penguatan akuntansi dan asset.
2. Peningkatan tertib administrasi keuangan dan tertib pengarsipan.
3. Penempatan SDM dengan latar belakang pendidikan Akuntansi pada masing-masing OPD sebagai Pejabat Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan.
4. Mengikutsertakan pelatihan penyusunan Laporan Keuangan Pejabat Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan.

Sejumlah Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan untuk menjamin pencapaian sasaran opini pengelolaan keuangan daerah ini, sebagai berikut :

Tabel 20
Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Menunjang Administrasi Keuangan

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
4	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20,722,002,597	21,075,782,047	99
4.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20,556,459,797	20,395,478,970	99
4.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20,527,410,197	20,366,429,370	99
4.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15,300,000	15,300,000	100
4.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13,749,600	13,749,600	100
Rata-rata Capaian Kinerja (%)		20,527,410,197	20,366,429,370	99

Pelaksanaan penganggaran Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran **opini pengelolaan keuangan daerah** belum memprioritaskan untuk mengatasi faktor penghambat pencapaian kinerja organisasi yakni pada rincian kode rekening kegiatan, hanya berisi belanja cetak dan penggandaan, yang seharusnya terdapat biaya pelatihan bagi Pejabat Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan, untuk meningkatkan sumber daya manusia, sehingga diperoleh kualitas pelaporan keuangan yang baik.

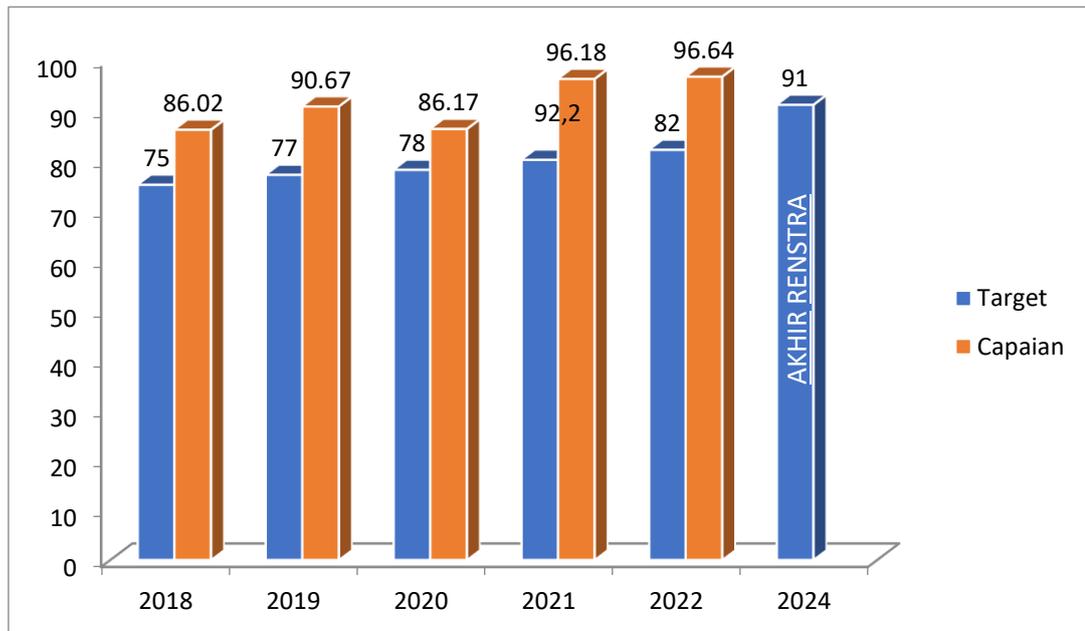
**Indikator 3 :
Indeks kepuasan pengguna pelayanan
publik perangkat daerah**



Dalam upaya memastikan tercapainya sasaran strategis Dinas Pertanian dan Pangan, maka diperlukan pula pencapaian sasaran strategis pada aspek manajemen perkantoran, sehingga kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan publik Dinas Pertanian dan Pangan semakin membaik. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Indeks Kepuasan Masyarakat tahun berkenaan, yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target pencapaian diakhir renstra digambarkan dalam grafik berikut :

Gambar 20
Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Kurung Waktu Empat Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra



Mencermati Grafik terkait survei kepuasan layanan pada Dinas Pertanian dan Pangan, maka dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan masyarakat/stakeholders tahun 2022 mencapai indeks 86,17 atau predikat kinerja layanan 'Baik'. Capaian ini melampaui dari target yang ditetapkan untuk tahun 2022, namun terjadi penurunan dari capaian tahun 2020 yaitu Predikat Sangat Baik menjadi Baik. Selanjutnya, capaian tahun 2022 menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya agar target kinerja jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2019-2024 dapat tercapai.

Pencapaian tersebut diperoleh dari hasil survey terhadap 6 (enam) layanan Dinas Pertanian dan Pangan yang digambarkan dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel 32
Jenis Layanan Dinas Pertanian dan Pangan

NO.	NAMA IZIN DAN NON IZIN	PERSYARATAN PERMOHONAN	LAMA WAKTU PENYELESAIAN REKOMENDASI	KET.
1	Rekomendasi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Alih Fungsi Lahan Perkebunan.	Permohonan Alih Fungsi 1 Lahan Surat Persetujuan Tetangga diketahui 2 Desa/Kelurahan 3 Fotocopy KTP Fotocopy Sertifikat Kepemilikan 4 Tanah/Sporadik 5 Fotocopy PBB Fotocopy NPWP (Bagi 6 Badan Usaha) Rekomendasi RTRW dari 7 PUPR Surat Keterangan Lahan 8 dari Desa/Kelurahan Denah Lokasi	1-2 Hari Kerja (Disesuaikan dengan kelengkapan dan status berkas yang masuk)	NON IZIN
2	Rekomendasi Usaha Penggilingan Padi	Mengisi Formulir 1 Permohonan Surat Persetujuan Tetangga diketahui 2 Desa/Kelurahan 3 Fotocopy KTP 4 Fotocopy NPWP Pas Foto Ukuran 3 x 4 cm 5 (Hitam Putih) Gambar Lokasi Tempat 6 Usaha Fotocopy SITU/SIUP 7 (Khusus Perpanjangan) 8 Izin Lingkungan Hidup	1 - 2 Hari Kerja (Disesuaikan dengan kelengkapan dan status berkas yang masuk)	IZIN
3	Rekomendasi Teknis Usaha	1 Mengisi Formulir Permohonan	1 - 2 Hari Kerja	

	<p>Bidang Pertanian</p> <p>1. Sarana Produksi Pertanian</p> <p>2. Alat dan Mesin Pertanian</p> <p>3. Benih/Bibit Pertanian</p>	<p>2 Surat Persetujuan Tetangga diketahui Desa/Kelurahan</p> <p>3 Fotocopy KTP</p> <p>4 Fotocopy NPWP</p> <p>5 Gambar Lokasi Tempat Usaha</p> <p>6 Fotocopy SITU/SIUP (Khusus Perpanjangan)</p>	<p>(Disesuaikan dengan kelengkapan dan status berkas yang masuk)</p>	<p>IZIN</p>
4	<p>Rekomendasi Teknis Usaha Bidang Peternakan</p> <p>1. Usaha Ternak/Unggas</p> <p>2. Pengeluaran Ternak</p> <p>3. Pemotongan Ternak/Unggas</p>	<p>Mengisi Formulir</p> <p>1 Permohonan Surat Persetujuan Tetangga diketahui Desa/Kelurahan</p> <p>2</p> <p>3 Fotocopy KTP</p> <p>4 Fotocopy NPWP Surat Keterangan</p> <p>5 Kesehatan Hewan (SKKH) Gambar Lokasi Tempat Usaha</p> <p>6 Fotocopy SITU/SIUP dan TDP (Khusus Perpanjangan)</p> <p>7</p> <p>8 Izin Lingkungan Hidup</p>	<p>1 - 2 Hari Kerja (Disesuaikan dengan kelengkapan dan status berkas yang masuk)</p>	<p>IZIN</p>
5	<p>Rekomendasi Teknis Usaha Bidang Perkebunan</p> <p>1. Benih/Bibit Perkebunan</p> <p>2. Alat dan Mesin Perkebunan</p>	<p>Mengisi Formulir</p> <p>1 Permohonan Surat Persetujuan Tetangga diketahui Desa/Kelurahan</p> <p>2</p> <p>3 Fotocopy KTP</p> <p>4 Fotocopy NPWP Gambar Lokasi Tempat Usaha</p> <p>5</p> <p>6 Fotocopy SITU/SIUP (Khusus Perpanjangan)</p>	<p>1 - 2 Hari Kerja (Disesuaikan dengan kelengkapan dan status berkas yang masuk)</p>	<p>IZIN</p>

6	Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu Sektor Pertanian	1 Fotocopy KTP Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan yang 2 diketahui oleh Camat	1 - 2 Hari Kerja	NON IZIN
---	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	------------------	----------

Berdasarkan hasil rekapitulasi hasil pengukuran terhadap survey kepuasan masyarakat, Nilai Interval IKM di Dinas Pertanian dan Pangan adalah:

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata	KETERANGAN
U1	Persyaratan	3,765	Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,765	
U3	Waktu Penyelesaian	3,941	
U4	Biaya/Tarif	3,941	
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,882	
U6	Kompetensi Pelaksana	3,765	
U7	Perilaku Pelaksana	3,882	
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,882	
U9	Prasarana dan Sarana	4,000	
NRR Tertimbang		3,865	
IKM Unit Pelayanan		96,64	

KESIMPULAN :

Dengan demikian Nilai IKM Unit Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Alih Fungsi Lahan, hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Jumlah NRRT/U : **3,865**
IKM Unit Pelayanan : $3,865 \times 25 = 96,64$
- MUTU PELAYANAN : **A**
- KINERJA UNIT PELAYANAN : **SANGAT BAIK**

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
B (Baik) : 76,61 - 88,30
C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

Hasil pengukuran dari 9 indikator unsur pelayanan pada Dinas Pertanian dan Pangan diperoleh Nilai Rata-rata Tertimbang per unsur adalah 3,4467. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Dinas Pertanian dan Pangan sebesar **96,64 (A = Sangat Baik)**. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar sudah memberikan

pelayanan kepada masyarakat khususnya kepada kelompok tani dengan baik atau memuaskan, namun masih perlu ditingkatkan pada pemenuhan unsur waktu penyelesaian, sarana dan prasarana pelayanan publik.

Analisis keberhasilan dan kegagalan

Faktor Penunjang :

1. Tingginya motivasi kerja Pegawai;
2. Adanya perkembangan teknologi dan informasi;
3. Meningkatnya perhatian perangkat daerah terhadap layanan yang disediakan Dinas Pertanian dan Pangan;

Faktor Penghambat :

1. Kondisi Bangunan Gedung Kantor yang sebagian dalam kondisi kurang layak;
2. Terbatasnya kelengkapan sarana prasarana pelayanan;
3. Terbatasnya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan;

Solusi :

1. Penataan ruang front office dan ruang kerja pegawai;
2. Optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana kerja.
3. Pengembangan sistem pembelajaran mandiri dan mentoring antar pegawai;

Sejumlah Program dan Kegiatan untuk menjamin pencapaian sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat perangkat daerah ini, sebagai berikut :

Tabel 22
Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Menunjang Manajemen
Perkantoran

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
4	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	454,405,906	21,075,782,047	99
4.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	343,885,200	343,885,200	100
4.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,080,700	100,080,700	100
4.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46,710,000	46,710,000	100
4.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13,072,200	13,072,200	100
4.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1,200,000	1,200,000	100
4.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	182,822,300	182,822,300	100
4.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5,799,300	5,799,300	100
4.4.1	Pengadaan Mebel	5,799,300	5,799,300	100
4.5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	159,345,506	159,306,380	100
4.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,000,000	12,000,000	100
4.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105,348,006	105,308,880	100
4.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41,997,500	41,997,500	100

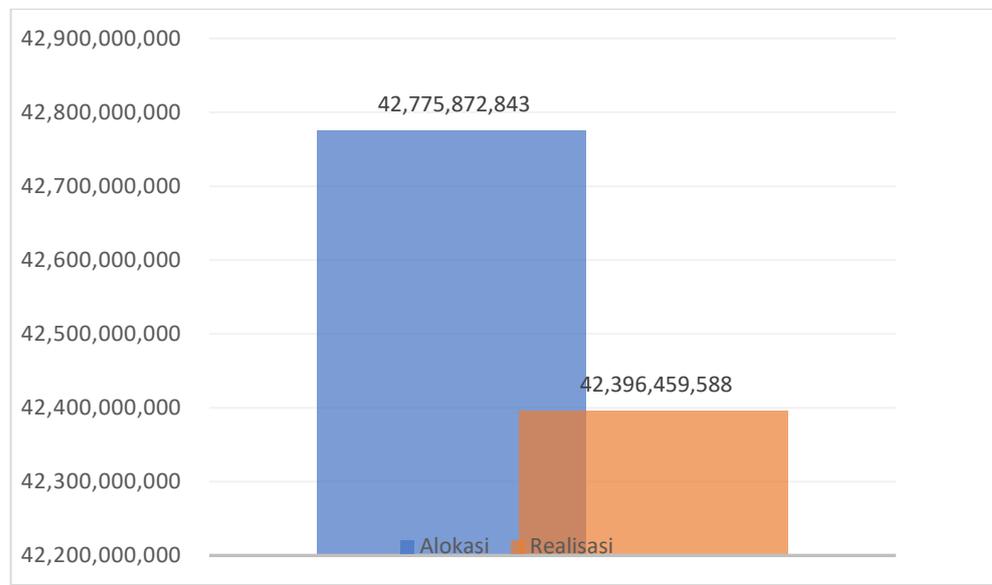
4.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	151,844,000	143,731,597	95
4.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	136,171,300	128,058,897	94
4.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5,172,700	5,172,700	100
4.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,500,000	10,500,000	100
Rata-rata Capaian Kinerja (%)		660,874,006	652,722,477	99

Pelaksanaan penganggaran Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran **Indeks Kepuasan Masyarakat** belum memprioritaskan untuk mengatasi faktor penghambat pencapaian kinerja organisasi, hal tersebut dapat dilihat dari rasio anggaran yang kecil untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan publik.

B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan dalam penggunaan sumber daya finansial. Laporan akuntabilitas kinerja yang baik harus disertai pula laporan akuntabilitas keuangan, sehingga efisiensi dan efektifitas penganggaran dapat diukur serta dapat diketahui nilai manfaat dari hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan. Adapun alokasi dan Realisasi Belanja Dinas Pertanian dan pangan, dapat disajikan sebagai berikut :

Gambar 21
Alokasi Anggaran dan Realisasi Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022



Untuk pencapaian sasaran Dinas Pertanian dan Pangan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp 42.775.872.843,-** dan terealisasi **Rp 42.396.459.588,-** atau persentase realisasi **99%**. Capaian realisasi keuangan tidak mencapai 100% dikarenakan terdapat sisa pagu pada Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, sisa tender dan lanjutan renovasi bangunan BPP dan Bank pakan silase serta operasional pasar murah. Sisa tender dana DAK tersebut tidak dapat dioptimalkan dikarenakan usulan perubahan rencana kegiatan pada aplikasi Krisna hanya terbuka pada Minggu Pertama Maret 2022 sedangkan pelaksanaan tender belum rampung saat bulan itu. Sedangkan untuk dana operasional pasar murah yang merupakan tambahan dana saat perubahan DPA 2022 hanya digunakan stabilisasi harga saat mendekati hari natal dan tahun baru.

Sedangkan jika ditinjau dari segi pencapaian kinerja diperoleh angka **139%**. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Tabel T-E-1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Pertanian dan Pangan berada pada kategori realisasi kinerja **Sangat Tinggi** yaitu interval nilai realisasi kinerja $91\% \leq 100\%$. Sedangkan dari segi efisiensi penggunaan anggaran Dinas Pertanian dan Pangan mampu melakukan efisiensi sebesar **40%**. Efisiensi tersebut terdapat pada pelaksanaan renovasi bangunan BPP, pembangunan bank pakan silase dan operasional pasar murah sebagaimana tersaji pada Tabel berikut :



Tabel 23. Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR	KINERJA			KEUANGAN			PROGRAM
		TARGET 2022	REALISASI 2022	PERSENTASE	ALOKASI	REALISASI	PERSENTASE	
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan							
	Indeks ketahanan pangan	73.72	74.17	101	2,000,000,000	1,999,500,000	100	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
					509,309,900	509,308,700	100	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
					187,454,700	87,394,700	47	Penanganan Kerawanan Pangan
2	Meningkatnya kapasitas produksi sektor pertanian							
	Persentase pertumbuhan produksi padi	0.50%	8%	1,600	7,545,246,500	7,465,384,500	99	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

	Persentase pertumbuhan produksi jagung	0.50%	203%	40,600	8,822,875,900	8,793,044,201	100	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Persentase pertumbuhan produksi kedelai	0.50%	-87%	(17,400)	395,610,200	395,610,200	100	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	Persentase pertumbuhan produksi buah-buahan	45%	-15%	(33)	239,834,000	239,808,000	100	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
	Persentase pertumbuhan produksi sayuran	0.50%	62%	12,400	155,500,140	155,500,140	100	Perizinan Usaha Pertanian
	Persentase pertumbuhan produksi Kakao	8.5%	0.98%	12	1,675,127,100	1,675,127,100	100	Penyuluhan Pertanian
	Persentase pertumbuhan produksi Kelapa	0.50%	0.82%	164				
	Persentase pertumbuhan Produksi Kopi	0.50%	0.03%	6				
	Persentase pertumbuhan Populasi Sapi	1.5%	0.56%	37				
	Persentase pertumbuhan Populasi Kambing	0.50%	0.01%	2				

	Persentase pertumbuhan Populasi Unggas	0.50%	0.50%	100				
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah							
	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	BB	100	21,244,914,403	21,075,782,047	99	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	95.56%	100.00%	105				
	Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Sangat Baik	100				
	TOTAL REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN	195.96	272.93	139	42,775,872,843	42,396,459,588	99	
	EFISIENSI ANGGARAN	(Total Realisasi Kinerja - Total Realisasi Keuangan)				40		

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Tahun 2022. Di dalam penyajian ini diuraikan realisasi kinerja yang dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikan, dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya serta perbandingan dengan target jangka menengah (tahun 2024) yang tertuang di dalam dokumen Renstra 2019-2024. Selanjutnya diuraikan pula faktor penunjang keberhasilan, kendala yang masih dihadapi serta alternatif solusi yang telah diupayakan. Laporan ini tentu dilengkapi pula dengan uraian akuntabilitas keuangan dan nilai efisiensi yang mampu dicapai atas kinerja yang dicapai.

Untuk pencapaian sasaran tersebut telah dialokasikan anggaran tahun 2022 sebesar **Rp 42,775,872,843,-** dan terealisasi **Rp 42,396,459,588,-** atau persentase realisasi **99%**, dengan rata-rata pencapaian kinerja **139 %**. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja ada Tabel T-E-1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dinas Pertanian dan Pangan berada pada kategori realisasi kinerja **Sangat Tinggi** yaitu berada pada interval nilai realisasi kinerja $91\% \leq 100\%$. Sedangkan dari segi efisiensi penggunaan anggaran Dinas Pertanian dan Pangan mampu melakukan efisiensi sebesar **40%**. Efisiensi tersebut terdapat pada pelaksanaan renovasi bangunan BPP, pembangunan bank pakan silase dan operasional pasar murah.

Sejumlah kendala yang perlu menjadi perhatian utama pada kinerja tahun-tahun selanjutnya yaitu, pada :

1. Peningkatan koordinasi lintas sektor untuk mencapai Ketahanan Pangan Daerah.

2. Pengawasan dan Pendampingan intensif dari hulu hingga hilir untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan dan Fasilitasi akses permodalan (KUR), mekanisasi, pengairan, kelembagaan, dan pemasaran.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 ini disusun, untuk bahan evaluasi dan perbaikan kinerja selanjutnya.

Polewali Mandar, 10 Februari 2023

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Polewali Mandar



H. ANDI IBRAHIM, SP, MP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 197207072000031009



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin Nomor 177 Kode Pos 91315
Telepon : (0428) 21013 Faks : (0428) 21013
e-mail : distanpan.polewalimandar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. HASSANI, SP, MMA**
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM MASDAR**
Jabatan : Bupati Polewali Mandar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,
BUPATI POLEWALI MANDAR,

H. ANDI IBRAHIM MASDAR

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN,

HASSANI, SP., M.MA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 1964 0706 198711 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks ketahanan pangan	73.57	73.72
2	Meningkatnya kapasitas produksi sektor pertanian	Persentase pertumbuhan produksi padi	-16%	0.50%
		Persentase pertumbuhan produksi jagung	-71%	0.50%
		Persentase pertumbuhan produksi kedelai	-88%	0.50%
		Persentase pertumbuhan produksi buah-buahan	43%	45%
		Persentase pertumbuhan produksi sayuran	-31%	0.50%
		Persentase pertumbuhan produksi Kakao	7.9%	8.5%
		Persentase pertumbuhan produksi Kelapa	-0.7%	0.50%
		Persentase pertumbuhan Produksi Kopi	-3.6%	0.50%
		Persentase pertumbuhan Populasi Sapi	0.8%	1.5%
		Persentase pertumbuhan Populasi Kambing	0,2%	0.50%
		Persentase pertumbuhan Populasi Unggas	-27.6%	0.50%
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	BB
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	94.56%	95.56%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Baik	Sangat Baik

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 21,284,635,220	PAD, DBH, DAU
2	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 509,309,900	DAU
3	Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 53,561,400	DAU
4	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 7,150,684,100	DAU
5	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 8,822,875,900	DAU, DAK
6	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 360,599,400	DAU
7	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 239,834,000	DAU
8	Perizinan Usaha Pertanian	Rp 155,500,140	DAU
9	Penyuluhan Pertanian	Rp 1,640,127,100	DAU
10	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp 2,000,000,000	DAU
JUMLAH		Rp 42,217,127,160	PAD, DBH, DAU dan DAK

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,
BUPATI POLEWALI MANDAR,




H. ANDI IBRAHIM MASDAR

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
PERIKANAN




H. HANI, SP, MMA
Pangkat : Pembina Utama Muda

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2022

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2022								Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2022		Ket
							I		II		III		IV						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2		3	4			5		6		7		8		9 = (5+6+7+8)		10 = 9/4 x 100%		11
				Kinerja	Rp														
1	PROGRAM	PENGLOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Lumbung Pangan Masyarakat	62.50	%	2,000,000,000					281,303,500		1,718,196,500	-	1,999,500,000	100	100		
1.1	Kegiatan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Total Ketersediaan Lumbung Pangan Masyarakat	10.00	Unit	2,000,000,000					281,303,500		1,718,196,500	-	1,999,500,000	-	100		
1.1.1	Sub. Kegiatan	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang terbangun	2.00	Unit	1,900,000,000					257,353,500		1,642,146,500	-	1,899,500,000	-	100		
1.1.2	Sub. Kegiatan	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah lantai Jemur yang terbangun	2.00	Unit	100,000,000					23,950,000		76,050,000	-	100,000,000	-	100		
2	PROGRAM	PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi	89		509,309,900		-	85,177,100		79,196,400		344,935,200	-	509,308,700	-	100		
			Skor PPH Ketersediaan	98										-		-			
2.1	Kegiatan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Penyediaa dan Penyaluran Pangan Pokok	53	Ton	14,538,100		-	5,772,900		3,000,000		5,765,200	-	14,538,100	-	100		
2.1.1	Sub. Kegiatan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Publikasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	12	Bulan	14,538,100	3		5,772,900	3	3,000,000		5,765,200	9	14,538,100	75	100		
2.2	Kegiatan	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	5	Ton	199,998,000							199,998,000	-	199,998,000	-	100		
2.2.1	Sub. Kegiatan	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang tersedia	5	Ton	199,998,000							199,998,000	-	199,998,000	-	100		
2.3	Kegiatan	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	396573	g/Kapita/Tahun	294,773,800			79,404,200		76,196,400		139,172,000	-	294,772,600	-	100		
2.3.1	Sub. Kegiatan	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Dokumen Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	1	Dokumen	42,773,800			25,068,200	1	11,704,400		6,000,000	1	42,772,600	100	100		
2.3.2	Sub. Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah rumah tangga yang mengembangkan tanaman pekarangan	8	KWT	252,000,000			54,336,000	2	64,492,000		133,172,000	8	252,000,000	100	100		
3	PROGRAM	PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	25	%	187,454,700		-	4,231,200		4,231,200		78,932,300	-	87,394,700	-	47		
3.1	Kegiatan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1	Dokumen	14,521,900		-	3,000,000		3,000,000		8,521,900	-	14,521,900	-	100		
3.1.1	Sub. Kegiatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1	Dokumen	14,521,900			3,000,000		3,000,000	1	8,521,900	1	14,521,900	100	100		
3.2	Kegiatan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan penanganan Daerah rawan pangan	1	Dokumen	172,932,800		-	1,231,200		1,231,200		70,410,400	-	72,872,800	-	42		
3.2.1	Sub. Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Dewan Ketahanan Pangan	1	Kali	7,885,900			1,231,200	1	1,231,200		5,423,500	1	7,885,900	100	100		

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan(Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2022								Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2022		Ket		
						I		II		III		IV								
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						Kinerja	Rp
1	2		3	4		5		6		7		8		9 = (5+6+7+8)		10 = 9/4 x 100%		11		
				Kinerja	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp			
3.2.2	Sub. Kegiatan	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat Rumah Tangga Rawan Pangan	45	KK	165,046,900						45	64,986,900	45	64,986,900	100	39			
4	PROGRAM	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prediksi SAKIP rata-rata perangkat daerah Opini Pengelolaan Keuangan perangkat daerah Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	BB WTP Baik		21,244,914,403		3,635,952,657		4,908,471,181		4,856,716,990		7,672,851,393	-	21,073,992,221		99		
4.1	Kegiatan	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Dokumen	27,580,600		2,000,000		10,218,000		4,224,800		11,137,800	-	27,580,600	-	100		
4.1.1	Sub. Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Rencana Kerja (RENUA) Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	1	Dokumen	2,224,800					1	2,224,800			1	2,224,800	100	100		
4.1.2	Sub. Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA/DPA Pokok Perangkat Daerah	1	Dokumen	19,505,800	1	2,000,000		7,968,000			2,000,000		7,537,800	1	19,505,800	100	100	
4.1.3	Sub. Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Monev Pembangunan dan LAKIP Perangkat Daerah selama satu tahun	1	Dokumen	5,850,000	1			2,250,000		-		3,600,000	1	5,850,000	100	100		
4.2	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase SPJ Fungsional	3	Dokumen	20,556,459,797		3,530,557,707		4,750,243,436		4,736,023,104		7,376,849,027	-	20,393,673,274	-	99		
4.2.1	Sub. Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang masuk daam Daftar Gaji/ Ampra Gaji bulanan dakam satu tahun	215	Orang	20,527,410,197	54	3,525,657,707	54	4,744,245,436	54	4,726,721,104	54	7,367,999,427	216	20,364,623,674	100	99		
4.2.2	Sub. Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1	Dokumen	15,300,000	1	2,000,000		3,998,000		5,302,000		4,000,000	1	15,300,000	100	100		
4.2.3	Sub. Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Perangkat Daerah	2	Dokumen	13,749,600		2,900,000	1	2,000,000		4,000,000	1	4,849,600	2	13,749,600	100	100		
4.3	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan manajemen perkantoran	30	Jenis	343,885,200		79,912,700		80,679,145		59,259,016		124,034,339	-	343,885,200	-	100		
4.3.1	Sub. Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis	2	Jenis	100,080,700	2	56,860,200		20,121,600		17,934,400		5,164,500	2	100,080,700	100	100		
4.3.2	Sub. Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan makanan dan minuman	2	Jenis	46,710,000	1	7,375,000		5,500,000	1	9,125,000		24,710,000	2	46,710,000	100	100		
4.3.3	Sub. Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis barang cetakan dan penggandaan	2	Jenis	13,072,200	1	3,213,400		3,213,400	1	3,213,400		3,432,000	2	13,072,200	100	100		
4.3.4	Sub. Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	1	Jenis	1,200,000			1	360,000		360,000		480,000	1	1,200,000	100	100		
4.3.5	Sub. Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD Keluar Daerah	12	Bulan	182,822,300	3	12,464,100	3	51,484,145	3	28,626,216		90,247,839	9	182,822,300	75	100		

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan(Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2022								Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2022		Ket	
						I		II		III		IV							
1	2		3	4		5		6		7		8		9 = (5+6+7+8)		10 = 9/4 x 100%		11	
4.4	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis mebel	2	Jenis	5,799,300													
4.4.1	Sub. Kegiatan	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel	2	Jenis	5,799,300													
4.5	Kegiatan	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Presentase Tagihan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	3	Jenis	159,345,506													
4.5.1	Sub. Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persen Surat masuk dan keluar yang dikelola	100	persen	12,000,000	25	2,000,000	25	2,000,000	25	4,000,000	25	4,000,000	100	12,000,000	100	100	
4.5.2	Sub. Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26	Rekening	105,348,006	7	14,482,250	2	20,856,250	10	21,577,350	7	48,408,900	26	105,324,750	100	100	
4.5.3	Sub. Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Kebersihan Kantor	2	Jenis	41,997,500	1	5,000,000		5,000,000	1	11,997,500		20,000,000	2	41,997,500	100	100	
4.6	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	Jenis	151,844,000		2,000,000		39,474,350		16,240,020		86,017,227	-	143,731,597	-	95	
4.6.1	Sub. Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang dibayar pajaknya	131	Unit	136,171,300	1		20	36,574,350	80	8,167,320	30	83,317,227	131	128,058,897	100	94	
4.6.2	Sub. Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan	1	Unit	5,172,700					1	5,172,700			1	5,172,700	100	100	
4.6.3	Sub. Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan	2	Jenis	10,500,000	1	2,000,000		2,900,000	1	2,900,000		2,700,000	2	10,500,000	100	100	
5	PROGRAM	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi padi	335,125	Ton	7,545,246,500	45,729,200	958,216,272	502,873,300	5,954,879,228	-	7,461,698,000	-	27					
		Jumlah produksi jagung	49,060	Ton															
		Jumlah Produksi kedelai	5,065	Ton															
		Jumlah Produksi Buah-Buahan	58,821	Ton															
		Jumlah Produksi Sayuran	2232	Ton															
		Jumlah produksi Kakao	33442	Ton															
		Jumlah produksi Kelapa	20,735	Ton															
		Jumlah Produksi Kopi	1,038	Ton															
		Jumlah Populasi Sapi	45007	Ekor															
		Jumlah Populasi Kambing	95776	Ekor															
		Jumlah Populasi Unggas	3544762	Ekor															
5.1	Kegiatan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Luas Panen Tanaman Pangan	84,765	Ha	3,414,036,900		8,666,000		4,000,000		290,704,700		3,107,183,700	-	3,410,554,400	-	100	
5.1.1	Sub. Kegiatan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengadaan Alsintan	30	Unit	852,766,800		8,666,000		4,000,000		33,351,200		803,349,600	-	849,366,800	-	100	
5.1.2	Sub. Kegiatan	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Kecamatan yang di dampingi	16	Kecamatan	2,561,270,100					16	257,353,500		2,303,834,100	16	2,561,187,600	100	100	
			Jumlah Prasarana dan Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan	7	Unit						7						7		100
5.2	Kegiatan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Luas Panen Tanaman Perkebunan	82,071	Ha	644,427,300		-		431,531,500		54,799,400		157,922,100	-	644,253,000	-	100	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2022								Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2022		Ket
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = (5+6+7+8)		10 = 9/4 x 100%		11
		Luas Panen Tanaman Hortikultura	Kinerja	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	% Kinerja	% Rp	
			786	Ha											-	-	
5.2.1	Sub. Kegiatan	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	6,927	Pohon	151,470,100			7,777,600	6,927	34,821,400		108,870,800	6,927	151,469,800	100	100	
5.2.2	Sub. Kegiatan	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1500	Pohon	60,747,300			28,556,100	1,500	7,840,000		24,351,200	1,500	60,747,300	100	100	
5.2.3	Sub. Kegiatan	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2	Jenis	432,209,900			395,197,800	2	12,138,000		24,700,100	2	432,035,900	100	100	
5.3	Kegiatan	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1860	Ekor	84,060,600			39,743,000		19,415,000		24,902,600		84,060,600	-	100	
5.3.1	Sub. Kegiatan	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	6100	Dosis	84,060,600	930		39,743,000	1,200	19,415,000	3,970	24,902,600	6,100	84,060,600	100	100	
5.4	Kegiatan	Penyediaan Benih/Bibit dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota Lain	3,406,691	Ekor	3,402,721,700			37,063,200		482,941,772		137,954,200		3,322,830,000	-	98	
5.4.1	Sub. Kegiatan	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	100	(Kambing, Sapi) Ekor	1,882,845,900			37,063,200	50	468,668,572		9,720,000	50	1,367,354,128	100	100	
5.4.2	Sub. Kegiatan	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	4	jenis	1,519,875,800			14,273,200	4	128,234,200		1,297,516,700	4	1,440,024,100	100	95	
6	PROGRAM	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	14	%	8,822,875,900			42,705,100		3,066,965,928		5,658,883,097		8,768,554,125	-	99	
6.1	Kegiatan	Pengembangan Prasarana Pertanian	2	Kecamatan	151,230,900			42,705,100		42,341,600		66,184,200		151,230,900	-	100	
6.1.1	Sub. Kegiatan	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	2	Kecamatan	88,937,700			9,145,100	1	30,341,600		49,451,000	2	88,937,700	100	100	
6.1.2	Sub. Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	2	Di	62,293,200			33,560,000	1	12,000,000		16,733,200	2	62,293,200	100	100	
6.2	Kegiatan	Pembangunan Prasarana Pertanian	93	Unit	8,671,645,000					3,024,624,328		5,592,698,897		8,617,323,225	-	99	
6.2.1	Sub. Kegiatan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	23	Unit	4,088,289,000				3	1,082,940,603		3,005,348,397	23	4,088,289,000	100	100	
6.2.2	Sub. Kegiatan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	17	Unit	1,921,052,000				1	401,445,000		1,519,607,000	17	1,921,052,000	100	100	
6.2.3	Sub. Kegiatan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	3	Unit	1,800,000,000					702,425,000		1,067,743,500	3	1,770,168,500	100	98	
6.2.4	Sub. Kegiatan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	15	Paket	862,304,000					837,813,725			15	837,813,725	100	97	
	PROGRAM	PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	13	%	395,610,200			124,062,400		38,614,450		232,933,350		395,610,200	-	100	
7.1	Kegiatan	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1000	Ekor	77,010,700			21,887,500		10,834,000		44,289,200		77,010,700	-	100	
7.1.1	Sub. Kegiatan	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1	Paket	77,010,700			21,887,500	1	10,834,000		44,289,200	1	77,010,700	100	100	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan(Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2022								Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2022		Ket			
						I		II		III		IV									
1	2		3	4		5		6		7		8		9 = (5+6+7+8)		10 = 9/4 x 100%		11			
7.2	Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	5	Layanan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp			
						117,000,000				51,977,800				11,700,000		53,322,200	-	117,000,000	-	100	
7.2.1	Sub. Kegiatan	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah ternak yang dilayani kesehatannya	4000	Ekor	117,000,000	6,092		3,500	51,977,800			11,700,000	2,500	53,322,200	12,092	117,000,000	302	100		
7.3	Kegiatan	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Operasional UPTD Breeding Center	12	Ha	81,599,600				50,197,100			13,208,150		18,194,350	-	81,599,600	-	100		
7.3.1	Sub. Kegiatan	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah ternak yang dikembangkan	27	Ekor	81,599,600			27	50,197,100			13,208,150		18,194,350	27	81,599,600	100	100		
7.4	Kegiatan	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Ternak Betina Produktif yang diselamatkan	10	Ekor	119,999,900							2,872,300		117,127,600	-	119,999,900	-	100		
7.4.1	Sub. Kegiatan	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Ternak Betina Produktif yang diselamatkan	10	Ekor	119,999,900							2,872,300	10	117,127,600	10	119,999,900	100	100		
8	PROGRAM	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Penanggulangan Bencana Pertanian	100	%	239,834,000		11,476,800		181,880,800			14,987,100		31,313,300	-	239,658,000	-	100		
8.1	Kegiatan	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Lahan yang tertangani	63	Ha	239,834,000		11,476,800		181,880,800			14,987,100		31,313,300	-	239,658,000	-	100		
8.1.1	Sub. Kegiatan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Perangkap Babi yang tersedia	52	Unit	179,734,100			52	156,468,100			8,576,000		14,514,000	52	179,558,100	100	100		
8.1.2	Sub. Kegiatan	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Pengadaan Pestisida	17	Botol	30,099,900			17	19,949,500			2,351,100		7,799,300	17	30,099,900	100	100		
8.1.3	Sub. Kegiatan	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah bibit kakao yang dihasilkan	3000	Pohon	30,000,000		11,476,800	3,000	5,463,200			4,060,000		9,000,000	3,000	30,000,000	100	100		
9	PROGRAM	PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian	93	%	155,500,140				75,925,940			16,678,400		62,895,800	-	155,500,140	-	100		
9.1	Kegiatan	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha yang dikeluarkan	60	Dokumen	125,500,440				66,460,840			9,738,400		49,301,200	-	125,500,440	-	100		
9.1.1	Sub. Kegiatan	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Jumlah Kelompok yang didampingi	2	Klp	55,399,900			1	18,216,500		1	3,738,400		33,445,000	2	55,399,900	100	100		
9.1.2	Sub. Kegiatan	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Kelompok yang dilatih	2	Klp	19,249,000			1	18,017,800		1	-		1,231,200	2	19,249,000	100	100		
9.1.3	Sub. Kegiatan	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Kelompok Penangkar Benih Padi	3	Klp	50,851,540	1			30,226,540		1	6,000,000	1	14,625,000	3	50,851,540	100	100		
9.2	Kegiatan	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Pengusaha Pertanian yang diawasi			29,999,700				9,465,100			6,940,000		13,594,600	-	29,999,700		100		
9.2.1	Sub. Kegiatan	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Ternak yang disembelih di RPH	730	EKOR	29,999,700	113		122	9,465,100	100		6,940,000	143	13,594,600	478	29,999,700	65	100		
10	PROGRAM	PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh Pertanian yang mengikuti Pelatihan Tematik	65	%	1,675,127,100				583,880,300			370,392,700		720,854,100	-	1,675,127,100	-			
			Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	5	%											-		-			
10.1	Kegiatan	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian Ahli dan Terampil	105	ORANG	1,675,127,100				583,880,300			370,392,700		720,854,100	-	1,675,127,100	-	100		

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan(Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2022								Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2022		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = (5+6+7+8)		10 = 9/4 x 100%		11
			Kinerja	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp	
10.1.1	Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Penyuluh Pertanian yang terlatih	60	ORANG	60	1,386,800,100		555,392,600		361,556,600		469,850,900	60	1,386,800,100	100	100	
		Jumlah Penyuluh yang dibayarkan honorumya	197	Orang	49		49		49		49		197		100		
10.1.2	Sub. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti penilaian	2350	Klp		148,738,000		852,000		4,981,100		142,904,900	-	148,738,000	-	100	
10.1.3	Sub. Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Penyuluhan	2	Jenis		76,124,400		16,867,100	2	-		59,257,300	2	76,124,400	100	100	
10.1.4	Sub. Kegiatan Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani untuk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	2	Kelembagaan Korporasi		63,464,600		10,768,600	2	3,855,000		48,841,000	2	63,464,600	100	100	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)			25,782		7,347	42,775,872,843	3,693,158,657	6,964,550,293	8,798	9,231,959,968		22,476,674,268	31,229	42,366,343,186	121	99	
Predikat Kinerja			Sangat baik														

Faktor pendorong keberhasilan kinerja OPD :

- 1 Sumber Daya Manusia yang handal dalam pelaksanaan TUPOKSI setiap unit kerja.
- 2 Terbangunnya komitmen yang kuat perangkat Daerah dalam Pencapaian target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja

Faktor penghambat pencapaian kinerja OPD :

- 1
- 2

Polewali, 5 Januari 2022
 Kepala Dinas

H. ANDI IBRAHIM, SP. MP
 Pangkat : Pembina Tk. I
 NIP : 19720707 200003 1 009

Keterangan :

1. Diisi sesuai dengan dengan maksud yang tertulis pada kolom dan baris.
2. Kolom 2 diisi dengan nama Program, nama kegiatan dan nama sub Kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam program, kegiatan, sub kegiatan pada Renja perangkat Daerah tahun 2022
3. Kolom 3 diisi dengan dengan nama Indikator Kinerja Outcome Program, Kinerja Output Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan yang tertuang Inditator Kinerja pada Renja perangkat Daerah tahun 2022
4. Kolom 4 diisi dengan Target Kinerja dan Anggaran (Rp) Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021), atau yang tertuang dalam DPA Perangkat Daerah Tahun 2022
5. Kolom 5 s.d 8 diisi dengan Realisasi Kinerja dan Rupiah-Anggaran (output, outcome dan Keuangan) sebagaimana yang tertuang dalam DPPA Perangkat Daerah 2022, secara lengkap untuk semua triwulan
6. Kolom 9= (5+6+7+8). isian kolom Kinerja dan kolom Rupiah dengan menjumlahkan Realisasi capaian kinerja dan Rupiah kolom 8, 9, 10 dan 11
7. Kolom 11=(9/4 x 100) isian kolom 9 dibagi hasil kolom 4 dikali 100